



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2004-2009



Badan Pusat Statistik - Indonesia

NERACA ARUS DANA INDONESIA

2004 - 2009

<https://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN NAD TAHUNAN INDONESIA

BADAN PUSAT STATISTIK, BANK INDONESIA, DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

**NERACA ARUS DANA INDONESIA
2004 - 2009**

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 9502002
Nomor Publikasi/ Publication Number : 07230.1002
I S S N : 0854-6967
Ukuran Buku/ Book Size : 21,5 cm x 28,5 cm
Jumlah Halaman/ Total Pages : 144 Halaman/ Pages

Naskah/Manuscript:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri/
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Diterbitkan Oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak Oleh/Printed by:

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
*May be cited with reference to the source***

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2004-2009 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia selama periode 2004 – 2009. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi finansial dan investasi non finansial tahunan dalam berbagai kategori transaksi finansial yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor institusi). Sektor institusi dalam publikasi ini terdiri dari: Bank Sentral, Perbankan, Bukan Bank, Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Bisnis/Swasta, dan Luar Negeri. Khusus untuk sektor Bukan Bank yang terdiri dari Pegadaian, Dana Pensiun, Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan, pada publikasi ini juga disajikan tersendiri baik dalam ulasan maupun tabel Neraca Arus Dana nya.

Publikasi Neraca Arus Dana Tahunan ini merupakan perwujudan dari hasil kerjasama Tim Penyusunan Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan yang terdiri dari unsur-unsur di Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) khususnya Direktorat Statistik Ekonomi Moneter, dan Kementerian Keuangan khususnya di BAPPEPAM-LK.

Publikasi ini adalah terbitan keduapuluh serta merupakan kelanjutan dari publikasi-publikasi Neraca Arus Dana Tahunan sebelumnya yang disajikan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik. Sajian yang ditampilkan pada publikasi ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Namun beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini telah mengalami perbaikan dan disesuaikan dengan data pendapatan nasional yang telah direvisi.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi Neraca Arus Dana Tahunan baik dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun dari Kementerian Keuangan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2010

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

RUSMAN HERIAWAN

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional.....	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	13
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	15
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD	17
BAB III KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia	21
3.2 Sumber Data	28
3.3 Metode Penyusunan	32
BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA	37
4.1 Neraca Pembiayaan Sektoral	37
4.2 Tinjauan Ekonomi Indonesia Berdasarkan NAD 2009.....	49
4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2009.....	58
4.4 Percepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>)	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Neraca Arus Dana Sederhana (Triliun Rupiah)	7
Tabel 4.1	Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2004-2009 (Triliun Rupiah)	38
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2004-2009 (Persen)	39
Tabel 4.3	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (Persen)	42
Tabel 4.4	Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2004-2009 (Triliun Rupiah) .	44
Tabel 4.5	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2004-2009 (Persen) .	45
Tabel 4.6	Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (Persen)	46
Tabel 4.7	Struktur Pinjaman Neto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (Persen)	48
Tabel 4.8	Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	55
Tabel 4.9	Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	56
Tabel 4.10	Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	61
Tabel 4.11	Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	62
Tabel 4.12	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	63
Tabel 4.13	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	65
Tabel 4.14	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	67
Tabel 4.15	Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	68
Tabel 4.15	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto, Tahun 2004 - 2009	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perkembangan Investasi Indonesia, Tahun 2004-2009 (Triliun Rupiah)	51
Grafik 4.2	Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2008 dan 2009 (Persen).	51
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia, Tahun 2004-2009 (Persen) .	52
Grafik 4.4	S-I gap Sektor-Sektor Keuangan dan Bukan Keuangan, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	53
Grafik 4.5	Komposisi Penempatan SBI Oleh Masing-Masing Sektor, Tahun 2009 (Persen)	56
Grafik 4.6	Perbandingan Beberapa Instrumen Finansial di Pasar Keuangan, Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)	57
Grafik 4.7	Perbandingan Instrumen-Instrumen Cadangan Devisa Pemerintah, Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)	58
Grafik 4.8	Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-Sektor LKBB, Tahun 2009	59
Grafik 4.9	Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)	59
Grafik 4.10	Proporsi Pinjaman Neto LKBB Menurut Sektor, Tahun 2009	60
Grafik 4.11	Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)	65
Grafik 4.12	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB, Tahun 2004 - 2009 (Persen)	72
Grafik 4.13	Velocity of Money, Tahun 2004 - 2009	73
Grafik 4.14	Pertumbuhan M1 dan PDB Atas Dasar Berlaku, Tahun 2004 - 2009	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L1-1-L1-10</i>
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	<i>L2-1-L2-9</i>
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	<i>L3-1-L3-12</i>
Lampiran 4. Matrik NAD Menurut Sektor	<i>L4-1-L4-17</i>

<https://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang secara lengkap menggambarkan penggunaan **tabungan** dan **sumber dana lainnya** untuk membiayai **investasi yang dilakukan** oleh **sektor-sektor institusi** pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menggambarkan arus transaksi finansial antar berbagai sektor institusi melalui (menggunakan) berbagai jenis instrumen finansial pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara **penerimaan** dengan **pengeluaran** dari kegiatan ekonomi. **Penerimaan** meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). **Pengeluaran** mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber untuk melakukan investasi. **Sumber lainnya** untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan kredit, dan sebagainya. Sedangkan **investasi yang dilakukan** oleh berbagai sektor institusi mencakup **investasi finansial** dan **investasi non finansial (investasi riil)**. **Investasi finansial** adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), kredit, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. **Investasi non finansial (investasi riil)** mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. **Sektor-sektor institusi** dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi dalam 3 sektor besar yaitu: **sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan, dan sektor Luar Negeri**. Sektor Keuangan terdiri dari sub sektor Bank Sentral, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sektor Bukan Keuangan meliputi sub sektor Rumah Tangga,

Pemerintahan Umum, Perusahaan Pemerintah, dan Perusahaan Swasta. Sedangkan Luar Negeri merupakan sektor tersendiri yang terpisah dari sektor-sektor lainnya.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari **baris** dan **kolom**. **Baris** pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun non finansial, seperti pembentukan modal tetap bruto, kredit, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan **kolom** pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu **kolom penggunaan** dan **kolom sumber**. **Kolom penggunaan** digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset non finansial, sedangkan **kolom sumber** digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuiti.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuiti.

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2004 hingga 2009 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2004 – 2009. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro adalah **tabungan bruto**, **investasi non finansial**, ***S-I gap*** dan **investasi finansial**.

Perkembangan tabungan bruto selama tahun 2004 – 2009 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 26,62 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 53,25 persen. Jika

melihat level tabungan pada masing-masing sektor, selama periode tersebut sektor Perusahaan (Perusahaan Swasta & Perusahaan Pemerintah) mempunyai level tabungan yang tertinggi. Disamping mempunyai level tertinggi, sektor Perusahaan juga mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan tabungan secara keseluruhan. Peranan sektor Keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto, relatif kecil yaitu berkisar antara 2,91 persen hingga 6,85 persen. Sedangkan sektor Luar Negeri mempunyai level tabungan yang paling kecil dimana kontribusi sektor ini terhadap pembentukan tabungan bruto berkisar antara minus 9,74 persen hingga minus 4,53 persen. Bahkan pada tahun 2004-2006 sektor ini mengalami tabungan yang negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran hutang Indonesia ke Luar Negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari Luar Negeri.

Berkaitan dengan investasi non finansial, secara total nilainya sama dengan tabungan bruto ($S = I$), sehingga pola perkembangan investasi non finansial sama dengan pola perkembangan tabungan bruto. Namun dilihat secara sektoral, tabungan bruto dan investasi non finansial memiliki nilai yang berbeda. Selama periode 2004-2009 kegiatan investasi non finansial sebagian besar dilakukan oleh sektor Bukan Keuangan dimana kontribusinya sebesar 99,39 persen dari total investasi non finansial. Sisanya sebesar 0,61 persen dilakukan oleh sektor Keuangan. Dalam sektor Bukan Keuangan, sub sektor Perusahaan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan subsektor lainnya, yaitu sebesar 76,26 persen. Sisanya merupakan kontribusi sub sektor Pemerintah dan Rumah Tangga. Kontribusi sektor Keuangan terhadap investasi non finansial nasional tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2004-2009, rata-rata kontribusi sektor itu tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor ini karena investasi yang dilakukan sebagian besar dalam bentuk investasi finansial seperti giro, deposito, surat berharga, surat utang negara, dan sebagainya. Sedangkan investasi non finansial sektor Luar Negeri tidak dicatat.

Jika tabungan bruto dikaitkan dengan investasi non finansial, maka terdapat suatu istilah yang disebut *S-I Gap* (Saving Investment Gap). *S-I Gap* merupakan selisih antara tabungan bruto dengan investasi non finansial. Jika suatu sektor mempunyai *S-I Gap* yang positif (*net lending*), maka sektor tersebut dapat menyalurkan kelebihannya ke sektor-sektor yang mempunyai *S-I Gap* negatif (*net borrowing*). Sektor yang mempunyai *S-I*

Gap negatif berarti terdapat kekurangan dana untuk membiayai investasi non finansialnya, kekurangan tersebut dapat ditutup dari sektor lainnya.

Selama periode 2004 -2009 *S-I Gap* sektor Bukan Keuangan relatif berfluktuatif dan pada umumnya negatif (net borrowing). Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang dilakukan sektor ini (terutama sub sektor Bisnis dan Perusahaan Pemerintah) pada umumnya tidak dapat dibiayai dari tabungan brutonya. Hal ini tidak lepas dari karakteristik kedua sektor tersebut yang tujuan utamanya menghasilkan barang dan jasa, sehingga dalam prosesnya biasanya memerlukan investasi yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh tabungan brutonya. *S-I Gap* pada sektor Keuangan selama 2004-2009 angkanya selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih mempunyai kelebihan (surplus) dana yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi sektor lainnya maupun untuk membiayai investasi finansialnya. Pada sektor Luar Negeri selama tahun 2004 - 2006 *S-I Gap* nya selalu negatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya serta mengindikasikan telah terjadinya *capital inflow*. Namun pada tahun 2007 – 2009 *S-I Gap* sektor ini selalu positif.

Selain investasi non finansial, investasi finansial juga perlu mendapat perhatian. Pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan dari investasi non finansialnya. Pada tahun 2009 kontribusi investasi finansial terhadap total investasi mencapai 65,3 persen. Sedangkan pada tahun 2008 peran investasi non finansial justru lebih dominan yaitu sebesar 69,8 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi perlambatan pertumbuhan investasi finansial dibandingkan investasi non finansialnya. Kondisi tersebut terjadi akibat krisis perekonomian global pada tahun 2008 dimana kondisi pasar modal sempat terpuruk. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan investasi finansial mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 110,7 persen di tahun 2007 menjadi minus 71,9 persen di tahun 2008. Namun di tahun 2009 kondisi tersebut berangsur kembali normal.

Hal menarik yang terjadi selama tahun 2009 adalah fenomena mengalirnya arus modal masuk (*capital inflow*) jangka pendek yang cukup deras dari luar negeri ke pasar keuangan Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari keadaan stabilitas makroekonomi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang positif serta imbal hasil yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Namun di sisi

lain, aliran modal masuk yang begitu cepat juga harus diwaspadai, karena akan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan jika terjadi pembalikan arus modal, sehingga dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Hal lain yang menarik disimak adalah fenomena penempatan dana sektor Perbankan. Hingga triwulan I 2009 sektor Perbankan lebih banyak menempatkan dananya di instrumen moneter Bank Sentral seperti SBI dan FASBI, meskipun *BI Rate* sudah menurun. Namun hal itu tidak membuat fungsi intermediasi perbankan menjadi terganggu, karena selama tahun 2009 fungsi ini mulai pulih kembali. Hal ini terlihat dari kredit yang disalurkan selama tahun 2009 masih cukup besar yaitu sebesar 174 triliun rupiah (kredit dalam rupiah) dan 77,9 triliun rupiah (kredit dalam valas).

Membaiknya stabilitas makroekonomi juga berdampak pada cadangan devisa. Selama tahun 2009 cadangan devisa meningkat sebesar 139,5 triliun rupiah atau setara 14,24 miliar dolar AS. Sehingga posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2009 mencapai 66,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan I impor barang dan jasa serta pembayaran utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Bicara mengenai sektor-sektor yang berperan dalam intermediasi perekonomian suatu wilayah, maka peran perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Selama tahun 2009, tabungan bruto yang tercipta oleh seluruh perusahaan dalam LKBB mencapai 40,69 triliun rupiah. Pada saat yang sama investasi non finansialnya juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 6,21 triliun rupiah. Disamping meningkatkan investasi non finansialnya, LKBB juga berupaya meningkatkan investasi finansialnya. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial (97,48 persen), sisanya dalam bentuk aset non finansial. Selama tahun 2009 LKBB berhasil meningkatkan aset finansialnya sebesar 240,47 triliun rupiah atau naik 298,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kewajibannya hanya bertambah sebesar 205,98 triliun rupiah. Kekurangan pembiayaan sebesar 34,49 triliun rupiah dibiayai dari *S-I gap* nya.

Hal lain yang juga menarik untuk diketahui dalam kaitannya dengan stabilitas keuangan moneter adalah masalah percepatan uang beredar (*Velocity of Money*) dan pendalaman sektor finansial (*financial deepening*). *Velocity of Money* (*V*) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar.

Jika V rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika V tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi. Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan menghitung rasio PDB terhadap M1, dimana M1 adalah posisi uang beredar sempit. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2004 – 2009 juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 yang hanya berada di kisaran angka 8,78 – 10,88. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2004 – 2009 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

Disisi lain, pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menarik eksekutif likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi. Indikator untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio M2/PDB, dimana M2 adalah posisi uang beredar luas.

Kondisi *financial deepening* Indonesia selama periode 2004 – 2009 menunjukkan bahwa sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Hal itu tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. *Financial deepening* terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2009, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah yaitu sebesar 38,15 persen. Pada sisi lain, kondisi sektor Keuangan yang dangkal memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Sektor Keuangan Indonesia yang dangkal menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terisolasi dari tekanan depresiasi atas beragamnya aset finansial yang berasal dari luar negeri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah sejak permulaan dasawarsa 1980 mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna sebagai masukan dalam

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi real merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya.² Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambar dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambar. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik sejak tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, namun usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia 1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD kesembilanbelas ini mencakup

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

periode 2004-2009, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2004-2009 merupakan publikasi kedupuluh yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab “*financial deepening*” berdasarkan data NAD 2004-2009.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan pula di akhir bab ini.
- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai neraca pembiayaan modal sektoral, dan keterkaitan finansial antar sektor.

<https://www.bps.go.id>

BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta non finansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Umumnya pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor Swasta Non Finansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor Swasta Non Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal NAD hanya mencatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor Keuangan, Rumah Tangga, Pemerintah, Bisnis dan Luar Negeri. Sektor Luar Negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Selain itu, dalam contoh ini hanya mencantumkan beberapa jenis kategori transaksi.

**TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)**

TRANSAKSI	KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200 Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0		44	
0300 Pinjaman Neto	0		10		-2		-11		3		0	
0400 Selisih Statistik	0		2		-1		0		-1		0	
0500 Inv. Finansial Neto	0		8		-1		-11		4		0	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16		60	
0700 Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800 Cadangan Valas		1							1		1	1
1000 Deposito		6	3		3		1		-1		6	6
1100 Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1				3	3
1200 Pinjaman	13			4		4		6	11	10	24	24
1300 Modal dan Penyertaan			2		1			4	1		4	4
1400 Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1			-1		-1	-1
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2								2	2
1800 Kredit Dagang							11	10	1	2	12	12
9000 Rupa-rupa		2	5			3		4	4		9	9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor Rumah Tangga mempunyai kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar 19 triliun rupiah, sedangkan tabungan bruto sektor Pemerintah hanya sebesar 6 triliun rupiah. Sektor Rumah Tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar 9 triliun rupiah, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di sektor Rumah Tangga berupa Deposito, Modal dan Penyertaan, Cadangan Asuransi dan Pensiun, serta Rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor Rumah Tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah 12 triliun rupiah. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar 4 triliun rupiah. Berdasarkan persamaan akuntansi, Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto, karena Pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih

statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang berbeda. Pinjaman Neto diperoleh dari neraca riil, sedangkan Investasi Finansial Neto dari neraca finansial. Pada tabel 2.1 untuk sektor Rumah Tangga tampak bahwa Pinjaman Neto sebesar 10 triliun rupiah dan Investasi Finansial neto 8 triliun rupiah, atau terdapat selisih statistik sebesar 2 triliun rupiah. Perilaku sektor Bisnis berbeda dengan Rumah Tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan Tabungan Bruto sebesar 15 triliun rupiah. Pembentukan Modal sektor Bisnis sebesar 26 triliun rupiah melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Akibatnya sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar 11 triliun rupiah. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar 24 triliun rupiah. Sebagian dari dana tersebut (13 triliun rupiah) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar 11 triliun rupiah merupakan pinjaman neto. Pada tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor Bisnis, Pinjaman Neto sama dengan Investasi Finansial Neto, sehingga selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor Keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi peranan sektor ini sangat besar bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Dalam tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa Tabungan Bruto sebanyak 1 triliun rupiah, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun jumlah penambahan harta finansial sektor Keuangan cukup besar, yaitu sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari surat berharga jangka pendek sebesar 1 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 13 triliun rupiah. Sumber dana atau penambahan jumlah kewajibannya juga sebesar 14 triliun rupiah yang merupakan pertambahan kewajiban Deposito sebesar 6 triliun rupiah dan sisanya 8 triliun rupiah merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara penambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula Pinjaman Neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar 6 triliun rupiah, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah 8 triliun rupiah, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebesar 2 triliun rupiah. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar 4 triliun rupiah dan

3 triliun rupiah berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali Obligasi Pemerintah yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar 1 triliun rupiah. Dengan demikian jumlah seluruh penambahan kewajiban sektor Pemerintah menjadi 6 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah penggunaan finansialnya sebesar 5 triliun rupiah yang terdiri penambahan Deposito, Surat Berharga Jangka Pendek, dan Penyertaan Modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah 5 triliun rupiah – 6 triliun rupiah = minus 1 triliun rupiah. Pada hal Pinjaman Netonya minus 2 triliun rupiah, sehingga menimbulkan selisih statistik minus 1 triliun rupiah.

Sektor Luar Negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar 3 triliun rupiah (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar 3 triliun rupiah dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori Tabungan Bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi riil. Dalam NAD, sektor Luar Negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Pada sisi penggunaan, sektor ini meningkatkan jumlah harta finansialnya sebesar 16 triliun rupiah, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah 11 triliun rupiah. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah 12 triliun rupiah. Dengan demikian investasi finansial netonya $16 - 12 = 4$ triliun rupiah tidak sama dengan Pinjaman Netonya (3 triliun rupiah), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah 1 triliun rupiah.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar 24 triliun rupiah (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta non finansial atau investasi riil sebesar 44 triliun rupiah.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya Deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar 6 triliun rupiah. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Pada tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa sektor Rumah Tangga dan Pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar 3 triliun rupiah, sektor Bisnis menambah 1 triliun rupiah, sedangkan sektor Luar Negeri menurunkan hartanya sebanyak 1 triliun rupiah.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), Ccadangan Aasuransi Jjiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor Asuransi dan sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi sektor Rumah Tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.⁴

Jika tabel 2.1 diperhatikan kembali, kenaikan harta berupa modal pada sektor Rumah Tangga sebesar 2 triliun rupiah mungkin berasal dari Modal Saham tahun yang lalu dan Modal yang disimpan oleh sektor Keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Pada sistem neraca nasional (*integrated system of national accounts*) setidaknya menyajikan 4 (empat) neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan besarnya tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai Ppembentukan Mmodal dan berapa Ppinjaman Nneto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan Luar Negeri, baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun dalam bentuk pinjaman dan transfer modal.

⁴ Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahui secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran dengan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran (*Income and Outlay Accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca Pendapatan dan Pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Pada sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun non finansial (disebut *current expenditure*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran selanjutnya dicatat pada Neraca Modal (*Capital Finance Accounts*) yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori. NAD juga mencatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti : Hak Paten dan Nama Baik (*Goodwill*), walaupun data semacam itu tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, dan Neraca Modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja.

NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit pada neraca pembayaran adalah negatif/positif pada tabungan di sektor Luar Negeri. Bagian Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus

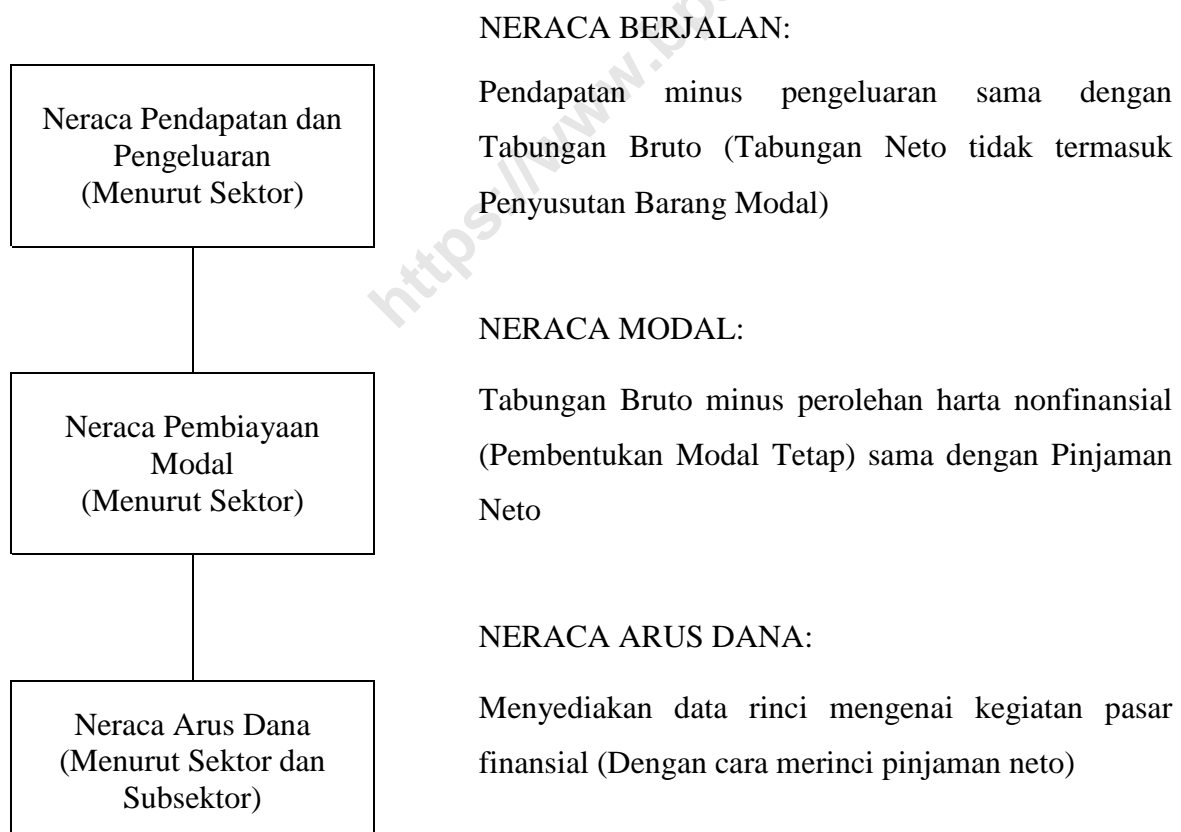
konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional.

Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk

komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Pada umumnya perusahaan mempunyai paling sedikit dua jenis laporan keuangan yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan bagian yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat diubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta riil dan harta finansial. Harta riil mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

$$\mathbf{HARTA RIIL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL}$$

atau

$$\mathbf{HARTA RIIL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\mathbf{HR_t + HF_t = U_t + MP_t, \quad \dots\dots\dots(1)}$$

dan

$$\mathbf{HR_{t-1} + HF_{t-1} = U_{t-1} + MP_{t-1} \dots\dots\dots (2)}$$

Jka persmaan (1) dikurangkan dengan persmaan (2) maka akan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\mathbf{\Delta HR_t + \Delta HF_t = \Delta U_t + \Delta MP_t}$$

Dengan mengganti MP_t dengan TB_t (tabungan bruto), persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta HF_t - \Delta U_t = \Delta TB_t - \Delta HR_t \dots\dots\dots (3)}$$

Berdasarkan persamaan (3) dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\mathbf{\Delta TB_t + \Delta U_t = \Delta HR_t + \Delta HF_t \dots\dots\dots(4)}$$

Persamaan (4) memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta riil dan harta finansial).

Persamaan (4) di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*data base*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor Swasta Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari

hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tidak dapat dihindarkan. Selain kelemahan sumber data, terdapat beberapa keterbatasan NAD lainnya yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data akan membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (*true flows*). Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai keterbatasan NAD berkaitan dengan penyusunannya.

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Akan tetapi

penurunan dana (misalnya penurunan piutang dagang), belum tentu berarti penurunan kas.

2.6.2 *Konsolidasi dan Gabungan Neraca*

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun sebagai kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 *"Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"*

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (*true flows*) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu transaksi yang diakibatkan karena hal-hal berikut ini :

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "*true flow*" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta maupun kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan

kurs yang sama. Demikian pula untuk periode sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan, hasilnya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba. Meskipun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD. Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Sebagai contoh, penilaian pada akhir tahun akan berbeda bila menggunakan sistem "*last in first out*" (LIFO) atau "*first in first out*" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena berdasarkan pada data yang ada. Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, sehingga seolah-olah terjadi penurunan level neracanya. Hal ini disebabkan karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui seberapa besar tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya.

Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antar kelompok.

Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya.⁵ Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.⁶ Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial.

⁵ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari *International Standard Industrial Classification* (ISIC).

⁶ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Luar Negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga Keuangan (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, sektor-sektor di atas (kecuali Luar Negeri), dikelompokkan menurut sektor Keuangan dan Bukan Keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor Keuangan, Bukan Keuangan dan Luar Negeri. Sektor Keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor Luar Negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor Keuangan, paling tidak sektor Bukan Bank (Lembaga Keuangan Lainnya) dan sektor Bank harus ada. Hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa hanya sektor Bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor Bukan Bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Selain itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor Keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Bank terdiri dari Bank Umum atau BPUG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah. Khusus

Bank Umum atau Bank Pencita Uang Giral (BPUG) secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank campuran, dan bank asing.

Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor Keuangan (bukan bank) tidak sebaik yang dimiliki sektor Perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Asuransi, Pegadaian dan Dana Pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor Asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, peranan sektor ini juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi seharusnya dibuat cukup rinci. Namun karena keterbatasan data yang tersedia, maka sektor ini masih bergabung dalam sektor Keuangan Bukan Bank. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial. Jenis usaha asuransi dibedakan menjadi tiga yaitu usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. Usaha penunjang asuransi meliputi usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi. Sedangkan program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) Jasa Raharja, PT (Pesero) Taspen, PT (Pesero) JAMSOSTEK, dan PT (Pesero) ASABRI. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Dana Pensiun.

Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu LKBB mencakup juga jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit. Walaupun peranan LKBB tidak sebesar sektor Bank tetapi keberadaannya cukup berarti. Suatu keunikan di dalam sistem finansial Indonesia adalah adanya sektor Pegadaian yang secara teknis operasinya masih sangat terkait dengan sektor Pemerintah. Di negara-negara lain juga terdapat sektor Pegadaian tetapi diselenggarakan oleh swasta. Lain halnya dengan sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor riil, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang

menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG, Perusahaan Swasta, Koperasi dan Rumah Tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD.

Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor Luar Negeri. Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor diantaranya merupakan sektor Keuangan, dan hanya 9 sektor adalah sektor Bukan Keuangan serta satu sektor Luar Negeri. Tetapi karena keterbatasan data, dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, terdiri dari Otoritas moneter, Bank Umum (BPUG), Lembaga Keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG), Bisnis (Perusahaan Swasta, dan Koperasi), Rumah Tangga dan Luar Negeri. Khusus untuk perusahaan Modal Ventura datanya masih belum memadai.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

1. *Otoritas Moneter*

2. *Bank*

- Bank umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Perbankan Syariah

3. *Lembaga Keuangan Lainnya*

- Perusahaan Pembiayaan (Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Kartu Kredit)
- Peransuransian (Usaha Asuransi, Usaha Penunjang Asuransi dan Program Asuransi Sosial)
- Dana Pensiun
- Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

1. *Rumah Tangga*
2. *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*
3. *Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG)*
4. *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial dan Koperasi)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 *Pembagian Kategori Transaksi*

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Harta Non Finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil atau pembentukan modal. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Harta Nonfinansial berisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Stok, dan Pembelian Barang Modal Bekas dari LN dan Harta Tak Berwujud Neto (PBHTN). Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Angka Pinjaman Neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan

merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan hutang dan piutang pajak antara sektor Pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan itu diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi menjadi (a) Cadangan Valuta Asing Pemerintah, (b) Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya, (c) Uang dan Simpanan, (d) Surat Berharga Jangka Pendek, (e) Pinjaman, (f) Modal (*Equity*), (g) Surat Berharga Jangka Panjang dan (h) Lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas.

Cadangan Valuta Asing Pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor Otoritas Moneter dengan sektor Luar Negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi Emas Moneter, *Special Drawing Right (SDR)*, Posisi Cadangan IMF, Cadangan Valuta Asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping Otoritas Moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor Luar Negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya.

Pada kategori Uang dan Simpanan, dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor

lainnya pada sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori Uang dan Simpanan Dalam Valuta Asing dan Rupiah secara terpisah. Masing-masing kategori ini dirinci lagi ke dalam Uang Kertas dan Logam, Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya, yang mencakup Tabungan Giro Pos dan Koperasi, berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi.

Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, Otoritas Moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain.

Pada prakteknya terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan non bank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Semua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen Kredit Bank Dalam Rupiah, Pinjaman Institusi Lain Dalam Rupiah, serta Pinjaman Dalam Valuta Asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit (yang berasal dari bank maupun institusi lainnya) dipecah menjadi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori Pinjaman Dalam Valuta Asing.

Setiap sektor dalam menjalankan kegiatannya tentu mempunyai Modal atau *Equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten), cara seperti itu merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, cara seperti itu merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas

tersebut, maka dalam NAD, kategori modal dirinci lagi jenisnya menjadi kategori transaksi Modal Saham dan Penyertaan (swasta) dan Penyertaan Modal Pemerintah, yang dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat Berharga Jangka Panjang (Obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor Pemerintah, Lembaga Keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Bagian dari kategori ini untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan obligasi pemerintah dan obligasi lainnya tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Saat ini obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri, seperti: Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti Cadangan Asuransi dan Pensiun, untuk sektor Asuransi dan Dana Pensiun, dan Dana Perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori Kredit Dagang. Kategori Klaim Antar Bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antara BPUG dan Bank Indonesia, maupun transaksi antar BPUG.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori Rupa-Rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang ditampilkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya ditampilkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya merupakan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode transaksi NAD, sebaliknya sektor Keuangan Bukan Bank dan sektor Bukan Keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang

memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri karena karakteristik data yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun.

Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian data itu sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan untuk membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Data Perusahaan Pembiayaan diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Perusahaan Dana Pensiun juga diperoleh dari Bappepam LK (Kementerian Keuangan) dan dari survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP). Data untuk sektor Asuransi (yang meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial) diperoleh dari Bappepam-LK (Kementerian Keuangan) berupa neraca konsolidasi untuk masing-masing jenis usaha asuransi. Sedangkan data untuk sektor Pegadaian diperoleh langsung dari Perum Pegadaian.

3.2.4 *Sektor Pemerintah*

Sektor Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Penyusunan NAD untuk sektor ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai tabungan dan pembentukan modal pemerintah, datanya diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 *Perusahaan Pemerintah*

Perusahaan Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG. Perusahaan Pemerintah di bidang keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sudah termasuk dalam kelompok sektor keuangan sebelumnya. BULOG, walaupun sebenarnya bukan merupakan perusahaan pemerintah tetapi untuk kepentingan penyajian, digabungkan dalam kelompok ini.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Kementerian Keuangan berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun demikian, data yang diperoleh belum mencakup seluruh BUMN yang ada, sehingga masih diperlukan penaksiran-penaksiran. Data untuk BUMD juga diperoleh dari Kementerian Keuangan, dengan cakupan yang masih kurang memadai. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain. Sementara itu, data untuk BULOG berupa neraca akhir tahun yang cukup rinci diperoleh langsung dari lembaga bersangkutan.

3.2.6 *Perusahaan Swasta*

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia. Artinya belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan data statistik keuangan sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.

Sumber data keuangan untuk sektor ini diperoleh dari Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS) NonFinansial yang dilakukan oleh BPS, serta dari data laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go-public* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data lainnya berasal dari Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak. Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka data dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambil dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain (khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran struktur finansialnya.

3.2.7 Koperasi

Sektor Koperasi terdiri dari Koperasi Pedesaan (KUD) dan Koperasi Perkotaan (non-KUD). Data untuk penyusunan NAD sektor ini diperoleh dari beberapa sumber. Data Induk Koperasi baik yang berkaitan dengan KUD maupun non-KUD diperoleh dari Kementerian Koperasi. Data KUD diperoleh dari hasil perkiraan Kementerian Koperasi, sedangkan data non-KUD diperoleh dari estimasi hasil survei khusus terhadap 1500 koperasi. Dalam publikasi NAD Indonesia, untuk memudahkan penyajian, sektor Koperasi ini dikelompokkan dengan Perusahaan Swasta.

3.2.8 Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya. Hal ini disebabkan belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga.

Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: Uang, Giro, Deposito, Kredit Bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor Bank. Data tabungan dan pembentukan

modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.9 *Luar Negeri*

Dalam penyusunan NAD Indonesia data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari beberapa sumber dengan cara tidak langsung (sebagai *counterpart accounts*). Data tersebut diturunkan dari hasil perhitungan NAD untuk sektor Otoritas Moneter, Bank dan Pemerintah. Selain itu, dipertimbangkan juga data yang berkaitan dengan transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*).

Tabungan sektor ini sama dengan surplus berjalan yang diperoleh dari Neraca Luar Negeri, Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 *Penyusunan Bagan Transaksi (Chart of Accounts) Sektoral*

Bagan transaksi adalah suatu media antara yang secara teknis digunakan untuk mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun berdasarkan neraca baik dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.
- ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 Penghitungan Arus Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif.

Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom, yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro sebagai sumber di BPUG, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila

dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).
 - Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali maka Selisih Statistik ditiadakan, sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.
- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data Penyusutan Barang Modal, Tabungan Neto, Pembentukan Modal Tetap dan Perubahan Stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas ke sektor-sektor yang tingkat ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.
- ii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti Uang, Giro, Deposito, Kredit Dagang, dan

Kredit Bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Terdapat beberapa instrumen yang hanya dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh Giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor Keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya diperoleh dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai, bahkan disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas perkembangan beberapa variabel penting yang dapat diturunkan dari matriks Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2004-2009. Pembahasan difokuskan pada neraca pembiayaan modal masing-masing sektor serta tinjauan perekonomian Indonesia tahun 2009 berdasarkan matrik NAD tahun 2009. Pada bagian lain, diberikan pula analisis yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana untuk sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tahun 2009 serta ulasan mengenai *Velocity of Money* dan *Financial Deepening*.

4.1. NERACA PEMBIAYAAN SEKTORAL

4.1.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor

Definisi dari tabungan bruto dan tabungan neto disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Perkembangan tabungan bruto menurut sektor selama tahun 2004 – 2009 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2004-2009, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 26,62 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 53,25 persen. Demikian pula bila dilihat secara level, tabungan bruto selama periode tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terakhir pada tahun 2009 tabungan bruto mengalami peningkatan hingga 1.738,24 triliun rupiah (lihat tabel 4.1). Sedangkan jika melihat secara sektoral, maka selama periode tersebut sektor Perusahaan (Swasta & Perusahaan Pemerintah) mempunyai level tabungan yang tertinggi. Level tabungan bruto terendah dimiliki oleh sektor Luar Negeri.

**Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2004-2009 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	505.63	737.22	832.94	953.15	1,385.07	1,579.89
1. Pemerintah	101.86	108.81	181.08	168.66	229.47	155.24
2. Perusahaan	265.16	436.64	471.60	543.14	816.47	1,025.85
- Pemerintah	83.93	3.83	3.71	40.59	64.48	52.35
- Swasta +)	181.22	432.80	467.89	502.55	751.99	973.49
3. Rumah Tangga	138.61	191.77	180.26	241.34	339.13	398.81
B. KEUANGAN	74.05	73.45	53.68	28.64	87.38	119.15
4. Bank ++)	70.59	62.65	44.87	9.26	68.77	78.45
5. Bukan Bank	3.46	10.80	8.82	19.39	18.61	40.69
C. LUAR NEGERI	(27.38)	(71.94)	(38.46)	2.78	36.38	39.19
6. Luar Negeri	(27.38)	(71.94)	(38.46)	2.78	36.38	39.19
JUMLAH	552.29	738.73	848.17	984.57	1,508.83	1,738.24

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Struktur Tabungan Bruto

Selama periode 2004-2009, sektor Bukan Keuangan memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 94,84 persen. Sedangkan persentase tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto dicapai pada tahun 2005, yaitu sebesar 99,8 persen. Namun setelah tahun 2005 kontribusinya terus menurun, bahkan pada dua tahun terakhir yaitu 2008-2009 persentasenya mengalami penurunan hingga hanya sebesar 91,8 persen dan 90,9 persen. Kondisi tersebut sedikit banyak disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang melanda hampir di seluruh kawasan dunia termasuk Indonesia.

**Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor
Tahun 2004-2009 (persen)**

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	91.55	99.80	98.21	96.81	91.80	90.89
1. Pemerintah	18.44	14.73	21.35	17.13	15.21	8.93
2. Perusahaan	48.01	59.11	55.60	55.17	54.11	59.02
- Pemerintah	15.20	0.52	0.44	4.12	4.27	3.01
- Swasta +)	32.81	58.59	55.17	51.04	49.84	56.00
3. Rumah Tangga	25.10	25.96	21.25	24.51	22.48	22.94
B. KEUANGAN	13.41	9.94	6.33	2.91	5.79	6.85
4. Bank ++)	12.78	8.48	5.29	0.94	4.56	4.51
5. Bukan Bank	0.63	1.46	1.04	1.97	1.23	2.34
C. LUAR NEGERI	(4.96)	(9.74)	(4.53)	0.28	2.41	2.25
6. Luar Negeri	(4.96)	(9.74)	(4.53)	0.28	2.41	2.25
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Tabungan Pemerintah adalah pendapatan yang oleh Pemerintah tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan Pemerintah dihitung sebagai total penerimaan Pemerintah dan hibah dikurangi konsumsi final Pemerintah atau sebagai selisih antara pendapatan Pemerintah dan hibah dikurangi pengeluaran berjalan. Peranan sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto selama periode 2004 – 2009 relatif lebih berfluktuasi. Pada tahun 2004, peranannya mencapai 18,44 persen, namun di tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 14,73 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh besarnya tekanan terhadap peningkatan belanja negara sebagai dampak dari tingginya harga minyak dunia yang mengakibatkan kenaikan subsidi BBM sejak tahun 2004. Disamping itu berbagai kejadian bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu tersebut juga meningkatkan pengeluaran Pemerintah, terutama untuk merestrukturisasi daerah-daerah yang terkena bencana.

Pada tahun 2006, peranan sub sektor Pemerintah dalam pembentukan tabungan bruto kembali meningkat menjadi 21,35 persen. Meskipun secara umum kondisi perekonomian di tahun 2006 relatif belum stabil pasca kenaikan BBM di tahun 2005, namun Pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan tetapnya yang berasal dari penerimaan pajak maupun non-pajak serta penerimaan hibah. Berikutnya selama tiga tahun berturut-turut setelah 2006, peranan tabungan bruto sub sektor Pemerintah terus

mengalami penurunan menjadi 17,13 persen (2007), 15,21 persen (2008), dan 8,93 persen (2009). Penurunan pada tahun 2007 – 2008 disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran utang Pemerintah ke IMF, sedangkan penurunan pada tahun 2009 lebih disebabkan karena adanya peningkatan pengeluaran rutin Pemerintah.

Selama periode 2004-2009, kontribusi sub sektor Perusahaan terhadap total tabungan bruto merupakan yang terbesar dibandingkan lainnya, yang didominasi oleh tabungan Perusahaan Swasta. Peranan sub sektor Perusahaan (Perusahaan Pemerintah dan Perusahaan Swasta) terhadap pembentukan tabungan bruto selama periode tersebut cukup berfluktuasi. Pada tahun 2004 sektor ini memberikan andil sebesar 48,01 persen terhadap total pembentukan tabungan bruto. Masing-masing disumbangkan oleh Perusahaan Pemerintah sebesar 15,20 persen dan Perusahaan Swasta sebesar 32,81 persen. Kontribusi tabungan sub sektor Perusahaan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 59,11 persen. Besarnya nilai kontribusi tersebut disebabkan karena kenaikan peranan Perusahaan Swasta sebesar 58,59 persen, sedangkan kontribusi Perusahaan Pemerintah hanya sebesar 0,52 persen. Namun selama periode 2006 – 2008 peranan sub sektor Perusahaan terhadap pembentukan tabungan bruto mengalami penurunan, dan kembali meningkat di tahun 2009.

Kontribusi tabungan bruto sub sektor Rumah Tangga selama periode 2004-2009 cenderung bergerak stabil dikisaran angka 20-30 persen. Pada tahun 2004 peranan sub sektor Rumah Tangga mencapai 25,10 persen dan meningkat menjadi 25,96 persen di tahun 2005. Namun peranannya kembali menurun pada tahun 2006. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan BBM yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Namun setahun kemudian di tahun 2007 peranan tersebut kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 24,51 persen. Pada tahun 2008 dan 2009 secara nominal, tabungan bruto sub sektor rumahtangga mengalami kenaikan, namun berdasarkan kontribusinya terjadi penurunan. Hal ini disebabkan kontribusi tabungan bruto sub sektor Perusahaan pada tahun-tahun tersebut mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga kontribusi sub sektor Rumah Tangga mengalami penurunan.

Peranan sektor Keuangan (Bank dan Bukan Bank) terhadap pembentukan tabungan bruto relatif kecil dibandingkan peranan sektor Bukan Keuangan. Pada tahun 2004, peranan sektor Keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto hanya sebesar 13,14 persen, dengan kontribusi subsektor Bank sebesar 12,78 persen dan kontribusi

subsektor Bukan Bank sebesar 0,63 persen. Peranan sektor Keuangan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 2,91 persen pada tahun 2007. Hal ini seiring dengan penurunan peranan sub sektor bank sebesar 0,94 persen pada tahun yang sama. Penurunan peranan subsektor bank tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah bank yang beroperasi. Sedangkan peranan sub sektor Keuangan Bukan Bank cenderung relatif stabil. Peranan sektor Keuangan berangsur naik kembali di tahun 2008 dan 2009 yaitu menjadi 5,79 persen dan 6,85 persen.

Sektor Luar Negeri mengalami tabungan yang negatif pada tahun 2004-2006, sehingga kontribusi sektor ini terhadap pembentukan tabungan bruto berkisar antara minus 9,74 persen hingga minus 4,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran hutang Indonesia ke Luar Negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari Luar Negeri. Namun pada periode 2007-2009, kontribusi sektor Luar Negeri ini positif, yaitu 0,28 persen (2007), 2,41 persen (2008), dan 2,25 persen (2009). Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2009 pendapatan domestik dari Luar Negeri cukup besar.

Struktur Tabungan Bruto Terhadap PDB

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Secara umum persentase seluruh sektor cenderung fluktuatif, di mana peningkatan persentasenya hanya terjadi di tahun 2005, 2008, dan 2009.

TABEL 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (persen)

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	22.02	26.57	24.94	24.12	27.97	28.14
1. Pemerintah	4.44	3.92	5.42	4.27	4.63	2.77
2. Perusahaan	11.55	15.74	14.12	13.75	16.49	18.27
- Pemerintah	3.66	0.14	0.11	1.03	1.30	0.93
- Swasta +)	7.89	15.60	14.01	12.72	15.19	17.34
3. Rumah Tangga	6.04	6.91	5.40	6.11	6.85	7.10
B. KEUANGAN	3.23	2.65	1.61	0.73	1.76	2.12
4. Bank ++)	3.07	2.26	1.34	0.23	1.39	1.40
5. Bukan Bank	0.15	0.39	0.26	0.49	0.38	0.72
C. LUAR NEGERI	(1.19)	(2.59)	(1.15)	0.07	0.73	0.70
6. Luar Negeri	(1.19)	(2.59)	(1.15)	0.07	0.73	0.70
JUMLAH	24.06	26.63	25.40	24.92	30.47	30.97
PDB (Triliun Rp)	2,295.83	2,774.28	3,339.22	3,950.89	4,951.36	5,613.44

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

**) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

Peranan terbesar dari struktur¹ ini pada periode 2004 – 2009 terdapat pada sektor Bukan Keuangan, di mana pada subsektor Pemerintah, persentase strukturnya cukup berfluktuatif pada periode tersebut. Persentase terkecil pada sub sektor Pemerintah ini terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,77 persen, sedangkan yang terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,42 persen. Peningkatan pada tahun 2006 tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan negara serta didukung dengan peningkatan penerimaan non pajak.

Kontribusi terbesar dari struktur ini terjadi di subsektor Perusahaan (Swasta dan Perusahaan Pemerintah) terutama subsektor Perusahaan Swasta. Selama periode tersebut persentase dari struktur pada subsektor Perusahaan Swasta selalu lebih besar dibandingkan pada subsektor Perusahaan Pemerintah. Pada tahun 2005 kontribusi subsektor Perusahaan naik sebesar 15,74 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 11,55 persen. Namun di tahun-tahun berikutnya yaitu 2006 dan 2007, kontribusinya sedikit menurun. Pada tahun 2008 hingga 2009, kontribusi sub sektor Perusahaan kembali meningkat terus dan mencapai 18,27 persen di tahun 2009. Peranan tabungan bruto sub sektor Rumah Tangga terhadap PDB dalam kurun waktu 2004-2008 relatif stabil, yaitu

¹ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur disini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

berada pada kisaran 5,40 hingga 6,91 persen, tetapi pada tahun 2009 peranannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 7,10 persen.

Pada sektor Keuangan, peranan struktur tabungan brutonya terhadap PDB selama periode 2004-2009 berada pada kisaran 0,73 persen hingga 3,23 persen. Jika dilihat per sektor, maka persentase subsektor Bank relatif lebih besar dibandingkan subsektor bukan bank. Pada subsektor Bank, di tahun 2004 persentasenya 3,07 persen, dan ini merupakan persentase terbesar selama periode 2004 - 2009. Sementara pada periode yang sama, persentase dari sub sektor bukan bank hanya sebesar 0,15 persen.

Struktur tabungan bruto sektor Luar Negeri terhadap PDB selama kurun waktu 2004-2006 selalu negatif, sedangkan selama tahun 2007-2009 mulai menunjukkan angka yang positif dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,73 persen.

4.1.2 Investasi Non-Finansial Menurut Sektor

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara secara total², akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

² Artinya penjumlahan tabungan bruto dan investasi non finansial dari seluruh sektor

**Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2004-2009 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	549.03	732.82	843.47	981.22	1,499.56	1,726.27
1. Pemerintah	76.44	90.21	113.72	133.69	181.31	189.83
2. Perusahaan	398.27	609.18	698.33	685.75	1,131.72	1,321.14
- Pemerintah	147.62	70.46	78.01	75.51	114.54	110.37
- Swasta +)	250.65	538.73	620.32	610.25	1,017.18	1,210.78
3. Rumah Tangga	74.32	33.43	31.42	161.77	186.53	215.30
B. KEUANGAN	3.27	5.91	4.70	3.36	9.27	11.96
4. Bank ++)	2.95	4.87	3.13	3.16	6.33	5.76
5. Bukan Bank	0.32	1.04	1.57	0.20	2.94	6.21
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	552.29	738.73	848.17	984.57	1,508.83	1,738.24

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

**) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

Struktur Investasi Non Finansial

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa selama periode 2004-2009 kegiatan investasi non finansial secara nasional sebagian besar dilakukan oleh sektor Bukan Keuangan yaitu sebesar 99,39 persen dari total investasi non finansial. Sisanya sebesar 0,61 persen dilakukan oleh sektor Keuangan.

Selama periode 2004-2009, kontribusi sektor Bukan Keuangan terhadap investasi non finansial secara umum terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 39,33 persen. Namun, pada tahun 2009 kontribusinya mengalami sedikit penurunan dari 99,39 persen pada tahun 2008 menjadi 99,31 persen pada tahun 2009. Penurunan tersebut diakibatkan adanya penurunan kontribusi dari subsektor Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah. Kontribusi subsektor Pemerintah mengalami penurunan dari 12,02 persen pada tahun 2008 menjadi 10,92 persen di tahun 2009. Sedangkan kontribusi subsektor Perusahaan Pemerintah selama periode 2004-2009 semakin menurun. Pada tahun 2004 subsektor Perusahaan Pemerintah memberikan kontribusi terhadap investasi non finansial sebesar 26,73 persen, namun setahun kemudian kontribusi ini menurun drastis hingga mencapai 9,54 persen. Kontribusi ini semakin menurun hingga 6,35 persen di tahun 2009.

**Tabel 4.5 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2004-2009 (persen)**

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	99.41	99.20	99.45	99.66	99.39	99.31
1. Pemerintah	13.84	12.21	13.41	13.58	12.02	10.92
2. Perusahaan	72.11	82.46	82.33	69.65	75.01	76.00
- Pemerintah	26.73	9.54	9.20	7.67	7.59	6.35
- Swasta +)	45.38	72.93	73.14	61.98	67.42	69.66
3. Rumah Tangga	13.46	4.52	3.70	16.43	12.36	12.39
B. KEUANGAN	0.59	0.80	0.55	0.34	0.61	0.69
4. Bank ++)	0.53	0.66	0.37	0.32	0.42	0.33
5. Bukan Bank	0.06	0.14	0.18	0.02	0.19	0.36
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial
++) termasuk Bank Sentral

Pada sektor Bukan Keuangan, Perusahaan (terutama Perusahaan Swasta) merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan subsektor lainnya (Pemerintah dan Rumah Tangga). Secara rata-rata kontribusi subsektor Perusahaan terhadap investasi non finansial nasional adalah sebesar 76,26 persen, sedangkan kontribusi subsektor lainnya hanya sebesar 12,66 persen (Pemerintah), dan 10,31 persen (Rumah Tangga).

Kontribusi sektor Keuangan terhadap investasi non finansial nasional tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2004-2009, rata-rata kontribusi sektor tersebut tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor Keuangan dikarenakan investasinya sebagian besar dalam bentuk investasi finansial seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, surat utang negara, dan sebagainya. Pada subsektor bank, kontribusinya secara rata-rata lebih besar daripada subsektor bukan bank. Namun secara rata-rata pertumbuhan sub sektor Bukan Bank lebih tinggi daripada sub sektor Bank.

Pada sektor Luar Negeri, investasi non finansial yang dilakukan tidak dicatat dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan karena kegiatan investasi non finansial yang dicatat dalam perekonomian nasional hanya mencakup kegiatan investasi yang terjadi di dalam negeri.

Struktur Investasi Non Finansial Terhadap PDB

Struktur investasi non finansial terhadap PDB selama periode 2004 – 2009 disajikan pada tabel 4.6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa struktur³ tersebut berkisar antara 24,06 persen hingga 30,97 persen. Secara keseluruhan struktur tersebut cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 27,08 persen pertahun tersebut selama periode 2004-2009. Dalam kurun waktu tersebut, struktur terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 30,97 persen, sedangkan struktur terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 24,06 persen.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (persen)

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	23.91	26.41	25.26	24.84	30.29	30.75
1. Pemerintah	3.33	3.25	3.41	3.38	3.66	3.38
2. Perusahaan	17.35	21.96	20.91	17.36	22.86	23.54
- Pemerintah	6.43	2.54	2.34	1.91	2.31	1.97
- Swasta +)	10.92	19.42	18.58	15.45	20.54	21.57
3. Rumah Tangga	3.24	1.20	0.94	4.09	3.77	3.84
B. KEUANGAN	0.14	0.21	0.14	0.09	0.19	0.21
4. Bank ++)	0.13	0.18	0.09	0.08	0.13	0.10
5. Bukan Bank	0.01	0.04	0.05	0.01	0.06	0.11
C. LUAR NEGERI	-	-	-	-	-	-
6. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	24.06	26.63	25.40	24.92	30.47	30.97
PDB (Triliun Rp)	2,295.83	2,774.28	3,339.22	3,950.89	4,951.36	5,613.44

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

++) termasuk Bank Sentral

Walaupun struktur pada seluruh sektor cenderung meningkat, tetapi sejak tahun 2005 hingga 2007 mengalami penurunan dari 26,63 persen di tahun 2005 menjadi 25,40 persen di tahun 2007. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kegiatan investasi fisik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di periode selanjutnya yakni tahun 2008 hingga 2009 struktur ini kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 30,47 persen di tahun 2008 dan 30,97 persen di tahun 2009.

Sektor Bukan Keuangan selama periode tahun 2004-2009 memiliki struktur yang paling dominan dibandingkan sektor lainnya. Struktur yang terjadi pada sektor Bukan

³ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur disini adalah struktur investasi non finansial terhadap PDB

Keuangan ini selama periode 2004-2009 memiliki rata-rata sebesar 26,91 persen. Pada sektor Bukan Keuangan, perusahaan merupakan subsektor yang mempunyai struktur paling dominan dengan rata-rata sebesar 20,66 persen. Struktur dari sub sektor Perusahaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu mencapai 23,54 persen, di mana sebesar 21,57 persen disumbangkan oleh sub sektor Perusahaan Swasta dan sisanya 3,84 persen dari sub sektor Perusahaan Pemerintah. Sedangkan subsektor lainnya yaitu Pemerintah dan Rumah Tangga persentasenya hanya sebesar 3,40 persen dan 2,85 persen.

Untuk sektor Keuangan, selama periode 2004-2009 strukturnya terlihat cukup berfluktuasi (baik pada subsektor Bank maupun pada subsektor Bukan Bank) yaitu berkisar antara 0,09 persen hingga 0,21 persen. Rata-rata persentase strukturnya untuk subsektor bank sebesar 0,12 persen sedangkan pada subsektor bukan bank hanya sebesar 0,05 persen.

4.1.3 Struktur Celah Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*)⁴ Menurut Sektor

S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) maupun memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas perkembangan struktur *S-I Gap* masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode 2004-2009

⁴ *S-I gap* (*Saving-Investment Gap*), merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Investasi Non Finansial, disebut juga pinjaman (meminjamkan/meminjam) neto atau investasi finansial neto. Meminjamkan neto (*net lending*) adalah suatu keadaan di mana tabungan bruto lebih besar daripada investasi non finansial, sebaliknya disebut meminjam neto (*net borrowing*).

Tabel 4.7 Struktur *S-I Gap* Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2004-2009 (persen)

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
A. BUKAN KEUANGAN	(1.89)	0.16	(0.32)	(0.71)	(2.31)	(2.61)
1. Pemerintah	1.11	0.67	2.02	0.89	0.97	(0.62)
2. Perusahaan	(5.80)	(6.22)	(6.79)	(3.61)	(6.37)	(5.26)
- Pemerintah	(2.77)	(2.40)	(2.23)	(0.88)	(1.01)	(1.03)
- Swasta +)	(3.02)	(3.82)	(4.56)	(2.73)	(5.36)	(4.23)
3. Rumah Tangga	2.80	5.71	4.46	2.01	3.08	3.27
B. KEUANGAN	3.08	2.43	1.47	0.64	1.58	1.91
4. Bank ++)	2.95	2.08	1.25	0.15	1.26	1.30
5. Bukan Bank	0.14	0.35	0.22	0.49	0.32	0.61
C. LUAR NEGERI	(1.19)	(2.59)	(1.15)	0.07	0.73	0.70
6. Luar Negeri	(1.19)	(2.59)	(1.15)	0.07	0.73	0.70
JUMLAH	-	-	-	-	-	-
PDB (Triliun Rp)	2,295.83	2,774.28	3,339.22	3,950.89	4,951.36	5,613.44

*) angka sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

***) angka sangat sementara

++) termasuk Bank Sentral

Sektor Bukan Keuangan

Struktur *S-I Gap* terhadap PDB pada sektor Bukan Keuangan persentasenya relatif berfluktuatif. Pada tahun 2004 sektor ini mengalami defisit dimana persentasenya sebesar minus 1,89. Namun pada tahun 2005 persentasenya meningkat menjadi sebesar 0,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini pada tahun 2005 tidak begitu banyak melakukan ekspansi pada investasi fisik. Namun pada tahun 2006 hingga 2009 persentase struktur ini kembali negatif yaitu antara minus 0,32 persen hingga 2,61 persen.

Sektor Keuangan

Struktur *S-I Gap* terhadap PDB pada sektor Keuangan selama 2004-2009 rasionya selalu positif, yaitu berkisar antara 0,64 persen di tahun 2007 hingga 3,08 di tahun 2004. Namun struktur ini sejak tahun 2004 hingga 2007 persentasenya cenderung menurun. Persentase yang positif pada sektor ini menunjukkan bahwa sektor ini masih mempunyai kelebihan (surplus) pada dana internalnya. Dana ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi sektor lainnya maupun untuk membiayai sendiri investasi finansialnya.

Sektor Luar Negeri

Struktur *S-I Gap* sektor Luar Negeri terhadap PDB selama periode 2004 hingga 2006 persentasenya selalu negatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya serta mengindikasikan telah terjadinya *capital inflow*. Keadaan sebaliknya terjadi selama tahun 2007 - 2009 di mana struktur pinjaman netonya terhadap PDB persentasenya selalu positif.

4.2 TINJAUAN EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NAD 2009

4.2.1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2009

Krisis perekonomian global yang melanda dunia pada tahun 2008, masih berlanjut di awal-awal tahun 2009. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan dunia yang masih mengalami tekanan berat. Namun sejalan dengan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh di banyak negara, secara perlahan hal itu mampu mengurangi masalah krisis global di pasar keuangan serta mulai menumbuhkan kembali kepercayaan pelaku pasar sejak triwulan II 2009.

Keadaan yang kurang lebih sama juga terjadi pada perekonomian Indonesia selama tahun 2009. Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis (hingga triwulan I 2009) menghadapi perekonomian Indonesia pada awalnya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Namun secara umum, perekonomian Indonesia tahun 2009 telah mampu melewati tahun penuh tantangan tersebut dengan capaian yang cukup baik.

Berbagai kebijakan (baik stimulus moneter maupun fiskal) yang telah dilakukan Pemerintah telah membawa kegiatan ekonomi kembali membaik sejak triwulan II 2009 hingga akhir tahun 2009. Keadaan tersebut tercermin pada berbagai indikator ekonomi baik di sektor Keuangan maupun sektor riil, seperti *Currency Default Swap* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), imbal hasil (*yield*) SUN, dan nilai tukar yang membaik, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Seiring dengan kondisi ekonomi global yang semakin membaik, keadaan sektor eksternal juga menjadi lebih baik dari prakiraan semula. Hal itu tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatat surplus sebesar 10,6 miliar dolar AS. Sedangkan

kinerja neraca transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar AS, lebih tinggi dari prakiraan awal.

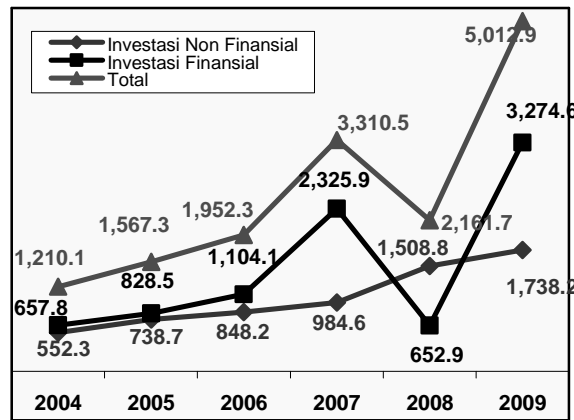
Mulai pulihnya pasar keuangan Indonesia dapat dilihat dari makin deras nya aliran masuk modal asing ke Indonesia. Kondisi tersebut secara langsung telah mendorong perbaikan kinerja di pasar keuangan domestik. Hal itu terlihat dari meningkatnya IHSG serta penurunan *yield* SUN. IHSG ditutup menguat tajam pada level 2.534 diakhir tahun 2009 dan rata-rata *yield* SUN menurun hingga mencapai 10,1 persen. Di pasar valas nilai tukar rupiah juga berada pada tren menguat di mana sejak awal triwulan II 2009, nilai tukar rupiah terapresiasi 18,4 persen dan ditutup di level 9.425 rupiah pada akhir Desember 2009.

Dari sisi sektor riil terutama sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 masih didukung oleh kuatnya permintaan domestik khususnya konsumsi Rumah Tangga maupun konsumsi Pemerintah yang tumbuh masing-masing sebesar 4,85 persen dan 15,72 persen. Disisi lain pembentukan modal tetap bruto juga tumbuh sebesar 3,22 persen. Meskipun kegiatan ekspor dan impor mengalami penurunan namun PDB pada tahun 2009 masih tumbuh sebesar 4,55 persen (walaupun melambat dibandingkan dengan tahun 2008). Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 tersebut merupakan tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India.

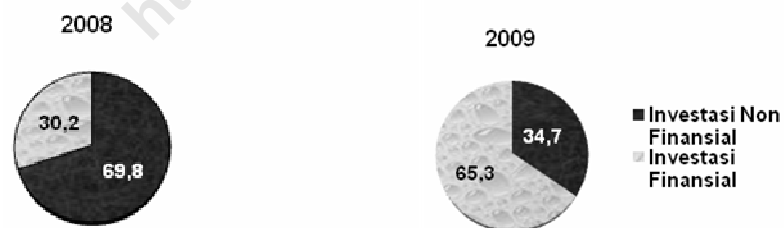
Di sisi lain harga-harga komoditi secara umum juga masih terkendali di mana tekanan inflasi pada tahun 2009 tercatat hanya sebesar 2,78 persen (menurun tajam dibandingkan tahun 2008 yang tercatat sebesar 11,06 persen). Sementara itu, inflasi inti juga menurun secara signifikan menjadi 4,28 persen dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 8,29 persen.

4.2.2. Investasi

Grafik 4.1 Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2004 – 2009 (Triliun Rupiah)



Yang dimaksud investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, kredit, valas, dsb. Perkembangan investasi selama tahun 2004 - 2009 dapat dilihat pada Grafik 4.1.

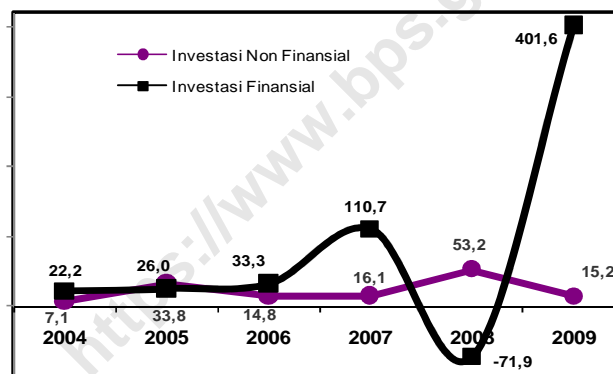


Grafik 4.2 Proporsi Investasi Indonesia, Tahun 2008 dan 2009 (Persen)

Pada umumnya peran investasi finansial lebih dominan dari investasi non finansialnya. Pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan investasi finansial terhadap total investasi mencapai 65,3 persen. Sedangkan pada tahun 2008 peran investasi non finansial justru lebih dominan yaitu sebesar 69,8 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi perlambatan pertumbuhan investasi finansial dibandingkan investasi non finansialnya.

Selama periode 2004-2009 investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat. Pertumbuhan investasi ini mempunyai kecenderungan yang meningkat, namun di beberapa periode pertumbuhannya mengalami kontraksi seperti yang terjadi di tahun 2006 dan 2009. Pada tahun 2006 pertumbuhan investasi ini hanya sebesar 14,8 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 33,8 persen . Begitu pula yang terjadi pada tahun 2009, di mana pertumbuhannya hanya sebesar 15,32 persen sedangkan tahun 2008 pertumbuhannya mencapai angka tertinggi yaitu 53,2 persen. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2006 dipengaruhi oleh menurunnya investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dari Luar Negeri serta alat angkutan dari dalam negeri, sedangkan penurunan investasi non finansial di tahun 2009 lebih banyak disebabkan perubahan inventori yang negatif akibat berkurangnya inventori (stok) nasional.

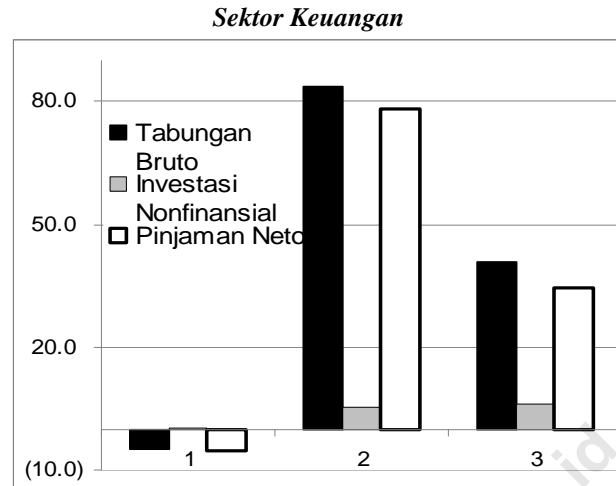
Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia, Tahun 2004 – 2009 (Persen)



Investasi finansial sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Ketika terjadi krisis perekonomian global pada tahun 2008, kondisi pasar modal sempat terpuruk. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan investasi finansial mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 110,7 persen di tahun 2007 menjadi minus 71,9 persen di tahun 2008. Namun perlahan tapi pasti kondisi tersebut dapat kembali normal di tahun 2009, bahkan pertumbuhannya di tahun tersebut melesat jauh hingga sebesar 401,6 persen.

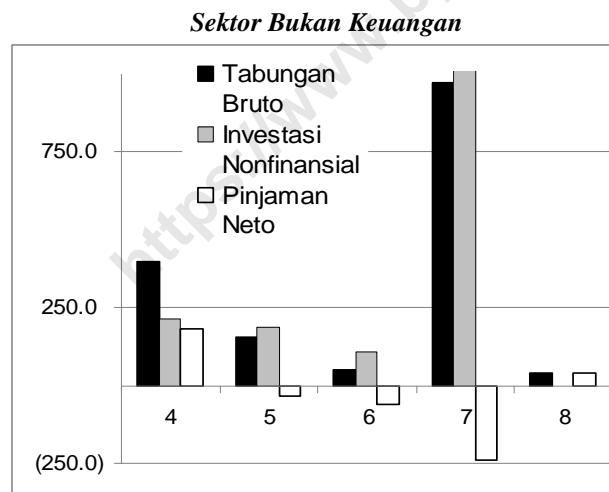
4.2.3. Celah Tabungan dan Investasi (*S-I gap*)

Grafik 4.4 *S-I Gap* Sektor-sektor Keuangan dan Bukan Keuangan Indonesia, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

1. Bank Sentral 2. Perbankan
 3. Bukan Bank (Pegadaian, Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan)



Keterangan:

4. Rumah Tangga 5. Pemerintah 6. Perusahaan Pemerintah
 7. Bisnis/swasta non finansial 8. Luar Negeri

Selama tahun 2009, separuh dari seluruh sektor yang ada mengalami *S-I gap* yang negatif. Artinya investasi non finansial yang dilakukan tidak dapat dibiayai oleh tabungan brutonya. Kekurangan tersebut dibiayai oleh sektor lainnya yang mempunyai kelebihan dana (*S-I gap* nya positif). Sektor-sektor yang mengalami *S-I gap* negatif adalah: Bank Sentral, Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, dan Bisnis. Khusus untuk Bank Sentral, *S-I gap* negatif yang dihasilkannya lebih disebabkan oleh menurunnya tabungan bruto yang

dihasilkan yaitu minus 5,1 triliun rupiah sedangkan investasi non finansialnya sebesar 0,3 triliun rupiah.

S-I gap negatif pada sektor Bisnis dan Perusahaan Pemerintah merupakan hal yang biasa terjadi, di mana investasi non finansialnya pada umumnya selalu lebih besar dari tabungan brutonya. Hal ini tidak lepas dari karakteristik kedua sub sektor tersebut yang tujuan utamanya menghasilkan barang dan jasa, sehingga dalam prosesnya memerlukan investasi yang tidak sedikit dan seringkali tidak dapat dipenuhi oleh tabungan brutonya. Sepanjang tahun 2009 kedua sub sektor Bisnis non finansial tersebut terlihat sangat aktif dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan investasi non-finansialnya yang sebesar 1.210,8 triliun rupiah (Bisnis) dan 110,4 triliun rupiah (Perusahaan Pemerintah). Untuk memenuhi kebutuhannya, kedua sub sektor tersebut hanya memiliki dana internal dalam bentuk tabungan bruto sebesar 973,5 triliun rupiah (Bisnis) dan 52,4 triliun rupiah (Perusahaan Pemerintah) sehingga kedua sub sektor tersebut membutuhkan tambahan dana sebesar 237,3 triliun rupiah dan 58 triliun rupiah.

Sub sektor Rumah Tangga merupakan penyumbang terbesar dalam memenuhi kekurangan dana dari sektor-sektor yang defisit (*S-I gap* nya negatif). Kontribusi yang diberikan sub sektor ini adalah sebesar 183,5 triliun rupiah. Sub sektor lainnya yang juga berperan dalam menyalurkan kelebihan likuiditasnya adalah Perbankan, Luar Negeri, dan Bukan Bank. Sub sektor Perbankan memberikan kontribusinya sebesar 78,1 triliun rupiah, sedangkan sub sektor Luar negeri dan Bukan Bank hanya memberikan kontribusi sebesar 39,2 triliun rupiah dan 34,5 triliun rupiah.

4.2.4. Gambaran Umum Beberapa Instrumen Finansial

Selama tahun 2009 investasi finansial mengalami ekspansi yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2008. Perubahan ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang semakin kondusif serta pulihnya kepercayaan para investor eksternal terhadap pasar keuangan di Indonesia.

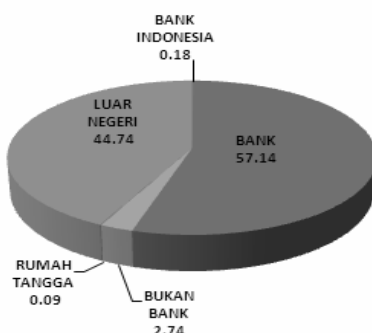
Investasi finansial pada tahun 2009 meningkat sebesar 3.274,7 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 401,6 persen dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar 652,9 triliun rupiah. Peningkatan sebesar itu terutama didorong oleh kegiatan di pasar modal yang mulai membaik, di mana pada tahun 2009 kapitalisasi saham yang terjadi sebesar 942,9

triliun rupiah atau 28,79 persen dari total investasi finansial. Instrumen lainnya yang juga cukup berperan dalam meningkatkan investasi finansial adalah uang dan simpanan, kredit (termasuk kredit dagang), dan penyertaan.

Tabel 4.8 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial tahun 2009 (Triliun rupiah)

Instrumen Finansial	Nilai	%
01. Cadangan Valas Pemerintah	139.52	4.26
02. Klaim dalam Valas Lainnya	(12.25)	(0.37)
03. Uang dan Simpanan	300.96	9.19
04. Surat Berharga Jangka Pendek	4.23	0.23
05. Kredit	261.14	7.97
06. Modal Saham dan Penyertaan	1,150.43	35.13
a. Modal Saham	942.88	28.79
b. Penyertaan	207.55	6.34
07. Surat Berharga Jangka Panjang	126.03	3.85
a. Surat Berharga Pemerintah	110.68	3.38
b. Surat Berharga Lainnya	15.35	0.47
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	105.79	3.23
09. Kredit Dagang	180.66	5.52
10. Rekening Antar Bank	101.88	3.11
11. Rupa-rupa	916.38	27.88
Jumlah	3,274.76	100.00

Sampai dengan triwulan I 2009 persepsi risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan oleh para pelaku pasar masih cukup tinggi, sehingga sub sektor Perbankan lebih banyak menempatkan dananya di instrumen moneter Bank Sentral seperti SBI dan FASBI, meskipun *BI Rate* sudah menurun cukup agresif pada triwulan I 2009. Namun hal itu tidak membuat fungsi intermediasi perbankan menjadi terganggu, karena selama tahun 2009 fungsi ini mulai pulih kembali. Hal ini terlihat dari kredit yang disalurkan selama tahun 2009 masih cukup besar yaitu sebesar 174 triliun rupiah (kredit dalam rupiah) dan 77,9 triliun rupiah (kredit dalam valas).

Grafik 4.5. Komposisi Penempatan SBI Oleh Masing-Masing Sektor, Tahun 2009 (Persen)

Hal lain yang menarik adalah fenomena mengalirnya arus modal masuk (*capital inflow*) jangka pendek yang cukup deras dari Luar Negeri ke pasar keuangan Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari keadaan stabilitas makroekonomi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang positif serta imbal hasil yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Keadaan ini tentunya menimbulkan persepsi positif bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

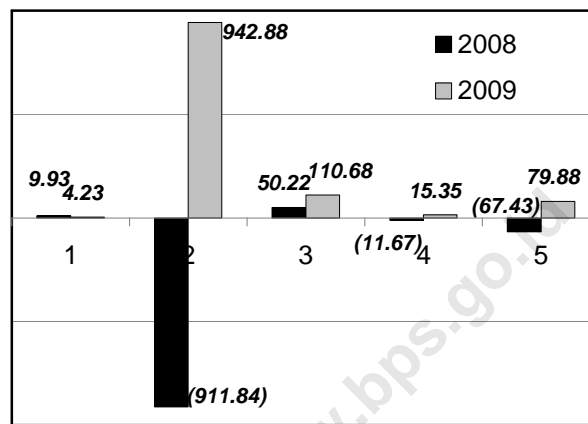
Tabel 4.9 Investasi Finansial Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)

KATEGORI TRANSAKSI	NILAI INVESTASI LN	TOTAL INVESTASI	%THD TOTAL INVESTASI
01. Klaim Dalam Valas Lainnya	(0.53)	(12.25)	4.31
02. Uang dan Simpanan	(10.42)	300.96	(3.46)
03. Surat Berharga Jangka Pendek & Menengah	1.39	4.23	32.96
04. Kredit	117.57	261.08	45.03
a. Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah	(0.55)	9.14	(6.02)
b. Kredit Dalam Valas	118.12	77.93	151.56
05. Modal Saham	207.91	942.88	22.05
06. Penyertaan	131.63	207.55	63.42
07. Surat Berharga Pemerintah	79.74	110.68	72.05
08. Obligasi Perusahaan	12.88	15.35	83.93
09. Kredit Dagang	(0.87)	180.66	(0.48)
10. Sertifikat Bank Indonesia	35.73	79.88	44.74
11. Rupa-rupa	(296.23)	916.32	(32.33)
JUMLAH	278.82	5,012.88	5.56

Pada Tabel 4.9 terlihat bahwa beberapa instrumen finansial jangka pendek telah menjadi sasaran investasi bagi para investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Instrumen yang paling menarik minat bagi investor asing adalah: Obligasi

Perusahaan, Surat Berharga Pemerintah, Penyertaan, SBI, dan Kredit. Bahkan kredit dalam valas yang disalurkan dari Luar Negeri, persentasenya mencapai 151,56 persen dari seluruh total kredit dalam valas. Di pasar keuangan, dominasi modal asing terhadap total surat berharga pemerintah (SBN), obligasi swasta, dan SBI juga sangat signifikan yaitu masing-masing sebesar 72,05 persen (SBN), 89,93 persen (Obligasi swasta), dan 44,74 persen (SBI).

Grafik 4.6 Perbandingan Beberapa Instrumen Finansial di Pasar Keuangan, Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)

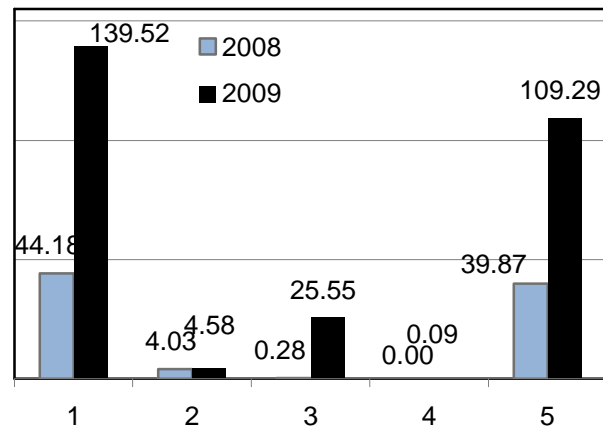


Keterangan:

1. Surat berharga jangka pendek dan menengah
2. Modal Saham
3. Surat Berharga Pemerintah
4. Obligasi Swasta
5. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Akibat derasnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia serta makin kondusifnya kondisi makroekonomi, kinerja pasar keuangan Indonesia telah meningkat secara tajam, terutama di pasar saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai perdagangan saham yang meningkat sebesar 86,98 persen selama tahun 2009. Sementara itu kapitalisasi pasar juga meningkat pesat yaitu dari minus 911,84 triliun rupiah di tahun 2008 (*flows*) hingga mencapai 942,88 triliun rupiah pada akhir tahun 2009 (*flows*). Namun di sisi lain, aliran modal masuk yang begitu cepat juga harus diwaspadai, karena akan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan jika terjadi pembalikan arus modal, sehingga dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah agar modal tersebut dapat bertahan lebih lama mengendap di pasar keuangan Indonesia.

Grafik 4.7 Perbandingan Instrumen-Instrumen Cadangan Devisa Pemerintah, Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

1. Cadangan Devisa Pemerintah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
2. Emas Moneter
3. Special Drawing Right
4. Posisi Cadangan IMF
5. Cadangan Valas Pemerintah

Membaiknya stabilitas makroekonomi juga berdampak pada cadangan devisa. Selama tahun 2009 cadangan devisa meningkat sebesar 139,5 triliun rupiah dibandingkan tahun 2008 atau setara 14,24 miliar dolar AS. Sehingga posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2009 mencapai 66,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan I impor barang dan jasa serta pembayaran utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

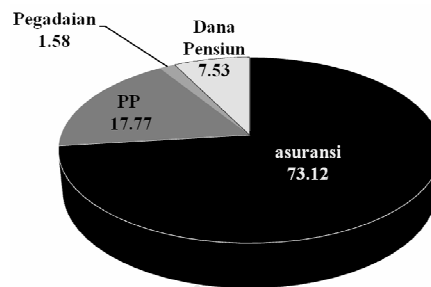
4.3. TINJAUAN NAD SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), TAHUN 2009

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam tulisan ini akan dianalisis tersendiri mengenai arus dana sektor LKBB selama tahun 2009. Sektor-sektor dalam LKBB sebenarnya jumlahnya cukup banyak, namun karena keterbatasan data, dalam bab ini hanya akan diuraikan terhadap 4 (empat) sektor LKBB saja. Keempat sektor dalam LKBB tersebut adalah : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian.

4.3.1. Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan S-I Gap LKBB 2009

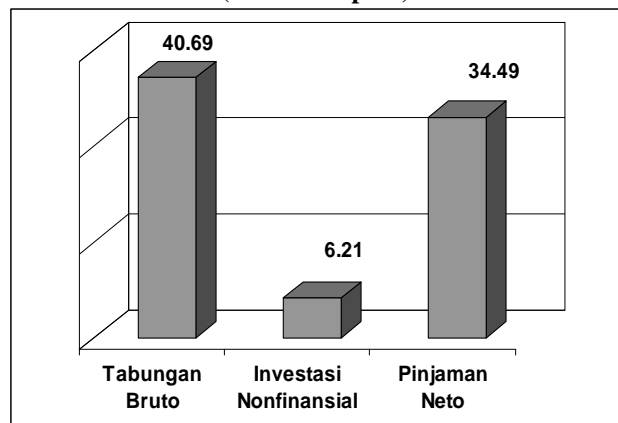
Pada Tabel 15 (yang disajikan pada lampiran) terlihat bahwa selama tahun 2009, tabungan bruto yang tercipta oleh seluruh perusahaan dalam LKBB mencapai 40,69 triliun rupiah⁵. Pada saat yang sama investasi non finansialnya juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 6,21 triliun rupiah⁶. Tabungan bruto LKBB sebagian besar berasal dari sektor Perusahaan Asuransi yang porsinya mencapai 73,12 persen dari total tabungan bruto LKBB

Grafik 4.8 Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-sektor LKBB, Tahun 2009 (Persen)



Peningkatan tabungan bruto dan investasi nonfinansial LKBB ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang semakin pasca krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008. Penurunan suku bunga pinjaman yang lebih rendah juga turut mendorong peningkatan kedua komponen tersebut.

Grafik 4.9 Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)

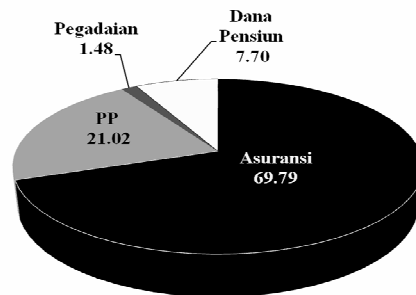


⁵ meningkat 118,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya

⁶ meningkat 111,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Pada tahun 2009 *S-I gap* sektor LKBB meningkat sebesar 34,49 triliun rupiah. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *S-I gap* yang tercipta ini meningkat signifikan sebesar 120,13 persen. Meningkatnya *S-I gap* tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan dalam laba usahanya⁷.

Grafik 4.10 Proporsi Pinjaman Neto LKBB menurut sektor, Tahun 2009 (Persen)



Jika diamati dari kinerja sektoralnya, *S-I gap* yang terjadi pada LKBB di tahun 2009 ini lebih banyak disebabkan oleh *S-I gap* yang terjadi pada sektor Perusahaan Asuransi sebesar 24,07 triliun rupiah (69,79 persen). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka semua sektor LKBB mengalami peningkatan *S-I gap* (kecuali Perusahaan Dana Pensiun yang mengalami penurunan *S-I gap* sebesar 66,72 persen). Sektor Perusahaan Asuransi mengalami peningkatan *S-I gap* tertinggi, sebesar 80,55 persen, diikuti Perusahaan Pembiayaan sebesar 57,93 persen, dan Perusahaan Pegadaian sebesar 16,99 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh ekspansif sebagai imbas pemulihan krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008. Kondisi ini turut berdampak terhadap sektor-sektor LKBB yang mampu menghasilkan kinerja jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

4.3.2. Investasi Finansial LKBB 2009

Sebagai bagian dari upaya ekspansi kegiatan ekonominya di samping meningkatkan investasi riil, LKBB juga melakukan investasi finansial. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial (97,48 persen), sedangkan sisanya dalam bentuk aset non finansial.

⁷ yang tercermin di tabungan bruto

**Tabel 4.10 Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2009
(Triliun Rupiah)**

Jenis Investasi Finansial	Penambahan	Pengurangan	neto
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya	0.00		0.00
03. Uang dan Simpanan	9.64		9.64
04. Surat Berharga Jangka Pendek		0.08	(0.08)
05. Kredit	9.16		9.16
06. Modal Saham dan Penyertaan	66.85		66.85
07. Surat Berharga Jk Pjg	85.73		85.73
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0.80		0.80
09. Kredit Dagang			
10. Rekening Antar Bank	2.19		2.19
11. Rupa-rupa	66.18		66.18
Jumlah	240.55	0.08	240.47

Selama tahun 2009 LKBB berhasil meningkatkan aset finansialnya sebesar 240,47 triliun rupiah atau naik 298,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset finansial sebesar itu berasal dari penambahan aset finansial sebesar 240,55 triliun rupiah dan pengurangan aset finansial sebesar 0,08 triliun rupiah. Aset finansial yang bertambah didominasi oleh surat berharga jangka panjang (85,73 triliun rupiah), dan modal saham/penyertaan (66,85 triliun rupiah). Sedangkan aset finansial yang menurun adalah surat berharga jangka pendek sebesar 0,08 triliun rupiah

Dari segi pembiayaan, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal dari *S-I gap*, sedangkan sumber eksternalnya berasal dari transaksi di pasar keuangan. Sumber pembiayaan eksternal merupakan kewajiban bagi LKBB.

Tabel 4.11 Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2009
(Triliun Rupiah)

Jenis Sumber Pembiayaan	Penambahan	Pengurangan	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Sumber Eksternal</u>	212.12	6.14	205.98
01. Cadangan Valas Pemerintah			0.00
02. Klaim dalam Valas Lainnya		2.93	-2.93
03. Uang dan Simpanan			0.00
04. Surat Berharga Jangka Pendek		0.18	-0.18
05. Kredit		3.03	-3.03
06. Modal Saham dan Penyertaan	13.96		13.96
07. Surat Berharga Jk Pjg	3.55		3.55
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	105.79		105.79
09. Kredit Dagang		0.00	0.00
10. Rekening Antar Bank	0.00		0.00
11. Rupa-rupa	88.82		88.82
<u>Sumber Internal</u>	34.49		34.49
12. <i>S-I Gap</i>	34.49		34.49
Jumlah	246.61	6.14	240.47

Selama tahun 2009 LKBB menambah kewajibannya sebesar 212,12 triliun rupiah. Sebagian besar dari kewajiban tersebut berupa cadangan asuransi dan pensiun yang bertambah sebesar 105,79 triliun. Peningkatan yang terjadi pada cadangan asuransi dan pensiun tersebut disebabkan oleh meningkatnya kewajiban tersebut di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Dana Pensiun masing-masing sebesar 88,49 triliun rupiah, dan 17,29 triliun rupiah.

Di samping menambah kewajibannya, sektor-sektor pada LKBB juga mengurangi kewajibannya sebesar 6,14 triliun rupiah. Jenis kewajiban yang berkurang adalah klaim dalam valas lainnya, surat berharga jangka pendek, dan kredit dagang masing-masing sebesar 2,93 triliun rupiah, 0,18 triliun rupiah, dan 3,03 triliun rupiah. Sehingga secara neto kewajiban sektor LKBB⁸ bertambah sebesar 205,98 triliun rupiah. Kewajiban (neto) sebesar itu ditambah dengan sumber internal LKBB (*S-I gap*) yang sebesar 34,49 triliun

⁸ yang juga merupakan sumber eksternal untuk investasi

rupiah merupakan dana yang siap digunakan untuk pembiayaan investasi finansial yang dilakukan oleh sektor-sektor LKBB.

4.3.3 Gambaran Ringkas Investasi Sektor-Sektor LKBB Tahun 2009

Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam LKBB. Hal ini disebabkan total aset yang dihasilkan merupakan yang terbesar yaitu mencapai hampir 90 persen dari total aset LKBB. Selama tahun 2009 aset sektor Perusahaan Asuransi bertambah sebesar 221,20 triliun rupiah. Sebagian besar aset yang terjadi selama periode tersebut berupa aset finansial yang porsinya mencapai 97,4 persen dari total aset atau bertambah (neto) sebesar 215,51 triliun rupiah.

Tabel 4.12 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>5.68</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>29.76</u>
		Tabungan Bruto	29.76
<u>Investasi Finansial</u>	<u>215.51</u>		
01. Uang dan Simpanan	6.66	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>191.44</u>
02. Kredit	0.05	01. Kredit	-0.06
03. Modal Saham dan Penyertaan	64.76	02. Modal Saham dan Penyertaan	11.64
04. Surat Berharga Jangka Panjang	76.85	03. Cadangan Asuransi dan Pensiun	88.49
05. Rekening Antar Bank	-1.06	04. Rupa-rupa	91.38
06. Rupa-rupa	68.26		
Jumlah	221.20		221.20

Perubahan (neto) aset finansial yang mencapai 215,51 triliun rupiah, berasal dari penambahan aset finansial sebesar 216,56 triliun rupiah serta pengurangan aset finansial sebesar 1,06 triliun rupiah. Penambahan aset finansial sebagian besar berupa obligasi⁹ sebesar 76,85 triliun rupiah, serta modal saham dan penyertaan sebesar 64,76 triliun.

⁹ Baik obligasi pemerintah maupun swasta

Sedangkan pengurangan aset finansial yang sebesar 1,06 triliun rupiah terjadi karena adanya penurunan (disinvestasi) berupa pelepasan surat berharga SBI.

Untuk membiayai investasinya (investasi fisik dan finansial), sektor ini menggunakan dana internal¹⁰ maupun eksternal¹¹. Dana internal awalnya digunakan untuk membiayai investasi non finansialnya, selisihnya¹² ditambah dengan dana eksternal akan digunakan untuk membiayai investasi finansialnya. Dana internal selama tahun 2009 meningkat sebesar 29,76 triliun rupiah, sedangkan dana eksternalnya meningkat sebesar 191,44 triliun rupiah. Sebagian besar dana eksternal berasal dari peningkatan cadangan asuransi¹³ sebesar 88,49 triliun rupiah atau 46,22 persen dari total dana eksternalnya. Sumber pembiayaan eksternal lainnya berasal dari modal saham/penyertaan dan rupa-rupa masing-masing sebesar 11,64 triliun rupiah dan 91,38 triliun rupiah. Di samping adanya penambahan kewajiban, perusahaan ini selama tahun 2009 juga melakukan pengurangan kewajibannya yaitu berupa kredit¹⁴ sebesar 0,06 triliun rupiah.

Perusahaan Pembiayaan (PP)

Seiring dengan stabilitas makroekonomi yang terus membaik serta suku bunga pinjaman yang cenderung rendah, penerimaan laba PP dari kegiatan usahanya juga semakin meningkat. Hal ini tercermin dari bertambahnya tabungan bruto sektor ini sebesar 7,23 triliun rupiah pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 29,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun total aset sektor ini selama tahun 2009 menurun tajam dibandingkan tahun 2008 dengan pertumbuhannya mencapai minus 87,54 persen. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2008 pada aset non finansial dan beberapa aset finansial yaitu, uang dan simpanan, kredit, serta rupa-rupa. Bahkan sektor ini selama tahun 2009 justru mengurangi aset non finansialnya (disinvestasi) sebesar 0,02 triliun rupiah (lihat Grafik 4.11).

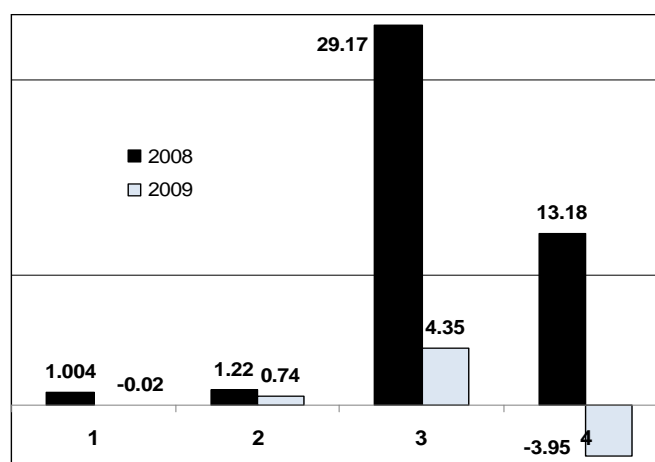
¹⁰ Berupa tabungan bruto

¹¹ berupa kewajiban finansial

¹² yang juga diistilahkan *S-I gap*

¹³ berupa hutang premi dari Perusahaan dan Rumah Tangga

¹⁴ terutama kredit bank dalam valas dan kredit dari institusi lain

**Grafik 4.11 Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan,
Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rupiah)**

Keterangan: 1. Investasi non finansial 3. Kredit
2. Uang dan simpanan 4. Rupa-rupa

Selama tahun 2009, sektor ini lebih memfokuskan investasi finansialnya dalam bentuk kredit yang disalurkan, serta surat berharga SBI. Kedua instrumen finansial tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,35 triliun rupiah (SBI) dan 3,15 triliun rupiah (Kredit). Penambahan tersebut jauh lebih besar dibandingkan penambahan aset finansial lainnya yaitu uang dan simpanan, serta surat berharga jangka panjang. Selain meningkatkan investasinya pada beberapa aset finansial, sektor ini juga mengurangi aset finansial lainnya yaitu surat berharga jangka pendek sebesar 0,05 triliun rupiah dan rupa-rupa.

**Tabel 4.13 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2009
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>-0.02</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>7.23</u>
		Tabungan Bruto	7.23
<u>Investasi Finansial</u>	<u>4.74</u>		
01. Uang dan Simpanan	0.74	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>-2.52</u>
02. Surat Berharga Jangka Pendek	-0.05	01. Klaim dalam Valas Lainnya	-2.93
03. Kredit	4.35	02. Surat Berharga Jangka Pendek	-0.15
04. Surat Berharga Jangka Panjang	0.49	03. Kredit	-5.96
05. Rekening Antar Bank	3.15	04. Modal Saham dan Penyertaan	2.33
06. Rupa-rupa	-3.95	05. Surat Berharga Jangka Panjang	2.06
		06. Rupa-rupa	2.13
Jumlah	4.72		4.72

Terkait pembiayaan investasi, sektor Perusahaan Pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Sehingga untuk mendukung kegiatan investasinya, sektor ini sangat tergantung pada perolehan tabungan bruto serta aliran dana eksternal terutama dalam bentuk kredit perbankan. Bila dilihat dari struktur sumber pendanaannya, selama tahun 2009 sumber dana utama sektor ini berasal dari tabungan bruto, modal saham dan penyertaan, kredit bank, serta surat berharga jangka panjang.

Sumber dana dalam bentuk kredit (seperti terlihat pada Grafik 4.13) walaupun secara total terjadi penurunan sebesar 5,96 triliun rupiah namun hal itu lebih disebabkan adanya penurunan (pelunasan hutang) pada kredit bank dalam bentuk valas sebesar 9,71 triliun rupiah. Sedangkan kredit bank dalam rupiah justru meningkat sebesar 3,75 triliun rupiah.

Selama tahun 2009 sektor ini terlihat lebih cenderung pada kebijakan untuk mengurangi kewajibannya dibandingkan meningkatkan aset finansialnya. Hal ini tercermin dari adanya penurunan kewajiban pada beberapa jenis pembiayaan (selain penurunan kredit bank dalam valas), yaitu klaim dalam valas lainnya, dan surat berharga jangka pendek yang total penurunannya mencapai 9,04 triliun rupiah. Penambahan kewajibannya hanya sebesar 6,52 triliun sehingga secara neto kewajibannya turun sebesar 2,52 triliun rupiah.

Perusahaan Dana Pensiun

Peranan sektor Perusahaan Dana Pensiun dalam kapasitasnya sebagai institusi intermediasi non bank hingga saat ini masih belum menunjukkan potensinya. Sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah Perusahaan Dana Pensiun di Indonesia yang masih aktif tercatat sebanyak 276 perusahaan, terdiri dari 251 perusahaan DPPK dan 25 perusahaan DPLK. Sedangkan jumlah pekerja yang tercatat sebagai peserta dana pensiun baru sebesar 2,68 juta. Menurut data BPS per Agustus 2008 diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja untuk kelompok wiraswasta (*self employed*), berusaha dengan pekerja tetap (*employer with permanent workers*), dan buruh/karyawan (*employee*) ada sebanyak 52,1 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat dimungkinkan untuk sektor ini menjaring peserta yang berasal dari kalangan pekerja lainnya.

Dari seluruh jumlah Perusahaan Dana Pensiun tersebut, nilai kekayaan (asset) yang berhasil dihimpun per akhir tahun 2009 mencapai 112,36 triliun rupiah atau 5,16 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2009¹⁵. Aset tersebut naik sebesar 15,63 triliun dibandingkan tahun 2008, dimana hampir seluruhnya (97,39 persen) berupa kenaikan dalam bentuk aset finansial.

Meskipun krisis global yang terjadi pada tahun 2008 sangat terasa dampaknya terhadap industri Dana Pensiun, namun sektor ini tidak terpancing untuk melepas investasinya di pasar bursa. Terbukti pada tahun 2009 bersamaan dengan membaiknya kondisi perekonomian global (dimana indeks harga saham di tahun 2009 meningkat drastis sebesar 1.355,41), langsung berdampak pada peningkatan nilai kekayaan sektor ini. Selama tahun 2009 aset yang menurun hanya dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang secara neto¹⁶ berkurang sebesar 0,03 triliun.

Tabel 4.14 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>0.41</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>3.06</u>
		Tabungan Bruto	3.06
<u>Investasi Finansial</u>	<u>15.22</u>		
01. Uang dan Simpanan	2.18	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>12.56</u>
02. Surat Berharga Jangka Pendek	-0.03	01. Surat Berharga Jangka Pendek	-0.03
03. Kredit	0.06	02. Kredit	-0.02
04. Modal Saham dan Penyertaan	2.10	03. Cadangan Asuransi dan Pensiun	17.29
05. Surat Berharga Jangka Panjang	8.39	04. Rupa-rupa	-4.68
06. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0.79		
07. Rekening Antar Bank	0.09		
08. Rupa-rupa	1.63		
Jumlah	15.63		15.63

Secara umum selama tahun 2009 investasi finansial di sektor ini tersebar ke dalam 8 jenis instrumen (lihat Tabel 4.14). Sedangkan jenis investasi yang menjadi pilihan utama dari pengurus dana pensiun dalam menempatkan dana kelolaannya adalah surat

¹⁵ atas dasar harga konstan 2000

¹⁶ Neto disini berarti pengurangan asset lebih besar dari penambahannya

berharga negara dan obligasi swasta (53,72 persen)¹⁷, saham/penyertaan (13,44 persen), dan deposito berjangka (15,36 persen).

Dari segi pembiayaan investasi, selama tahun 2009 sumber pembiayaan terbesar berasal dari hutang iuran anggota Perusahaan Dana Pensiun (cadangan pensiun) yang meningkat sebesar 17,29 triliun rupiah. Sedangkan sumber pembiayaan lainnya yaitu surat berharga jangka pendek, kredit, dan rupa-rupa, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit¹⁸ dan surat berharga jangka pendek selama tahun 2009 masing-masing turun sebesar 0,02 triliun rupiah dan 0,03 triliun rupiah.

Pegadaian

Gambaran mengenai sektor pegadaian dalam tulisan ini mengacu kepada kinerja dari Perum Pegadaian¹⁹. Walaupun total aset perusahaan ini paling kecil di antara LKBB lainnya, namun selama tahun 2009 perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang cukup meningkat. Hal ini terlihat dari besaran kredit yang disalurkan yang mencapai peningkatan 4,7 triliun rupiah serta jumlah nasabah sebanyak 20,9 juta nasabah selama tahun 2009.

Tabel 4.15 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2009 (Triliun Rupiah)

Jenis Portofolio Investasi	Nilai	Sumber Pembiayaan Investasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Investasi Nonfinansial</u>	<u>0.13</u>	<u>Sumber Internal</u>	<u>0.64</u>
		Tabungan Bruto	0.64
<u>Investasi Finansial</u>	<u>5.00</u>		
03. Uang dan Simpanan	0.06	<u>Sumber Eksternal</u>	<u>4.49</u>
05. Kredit	4.7	05. Kredit	3.01
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0.01	07. Surat Berharga Jangka Panjang	1.49
11. Rupa-rupa	0.23	09. Kredit Dagang	(0.00)
		11. Rupa-rupa	-0.01
Jumlah	5.13		5.13

Sejalan dengan meningkatnya aktiva maka beberapa sumber eksternal (kewajiban) perusahaan ini juga mengalami peningkatan. Hingga tahun 2009 perusahaan ini telah

¹⁷ Proporsi kenaikan jenis instrumen finansial terhadap total aset (aset non finansial dan aset finansial)

¹⁸ Berupa kredit bank dalam rupiah dan valas

¹⁹ Sebagai institusi yang bergerak dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

menerbitkan obligasi sebanyak 3 (tiga) kali, dan selama tahun 2009 obligasi yang diterbitkan mencapai 1,49 triliun rupiah. Selain obligasi, sumber dana lainnya yang utama adalah kredit bank yang meningkat sebesar 3,01 triliun rupiah selama tahun 2009. Sedangkan dana internal (tabungan bruto) yang digunakan sebagai sumber pembiayaan hanya meningkat 0,64 triliun rupiah. Hal ini telah membuktikan kepercayaan dari dunia perbankan dan investor pasar modal terhadap kinerja perusahaan ini.

Informasi sumber dana yang berasal dari saham tidak relevan karena sesuai dengan status hukum perusahaan (yang berbentuk Perusahaan Umum), modal perusahaan ini bukan berbentuk saham tetapi berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Pemegang saham Perum Pegadaian 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4.4. PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.4.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian.

Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar 50 ribu rupiah, maka *V* yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang 50 ribu rupiah tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (*V*) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu 50 ribu rupiah namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah 100 ribu rupiah, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2.$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Di samping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : V = *Velocity of Money*

 PDB = Produk Domestik Bruto

 M₁ = Uang beredar sempit

4.4.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

Pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik eksese likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.
- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor

menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid.

Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.4.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2004-2009

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (V) dan *financial deepening* (FD) selama periode 2004-2009. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

**Tabel 4.8 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto
Tahun 2004-2009**

Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) 1)				PDB 2) (Triliun Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	M2			M1/PDB	M2/PDB
2004	245.95	785.26	2.67	1,033.88	2,295.83	9.33	10.71	45.03
2005	271.14	929.34	2.28	1,202.76	2,774.28	10.23	9.77	43.35
2006	347.01	1,032.87	2.62	1,382.49	3,339.22	9.62	10.39	41.40
2007	450.06	1,196.12	3.49	1,649.66	3,950.89	8.78	11.39	41.75
2008	456.79	1,435.77	3.28	1,895.84	4,951.36	10.84	9.23	38.29
2009	515.82	1,622.06	3.50	2,141.38	5,613.44	10.88	9.19	38.15

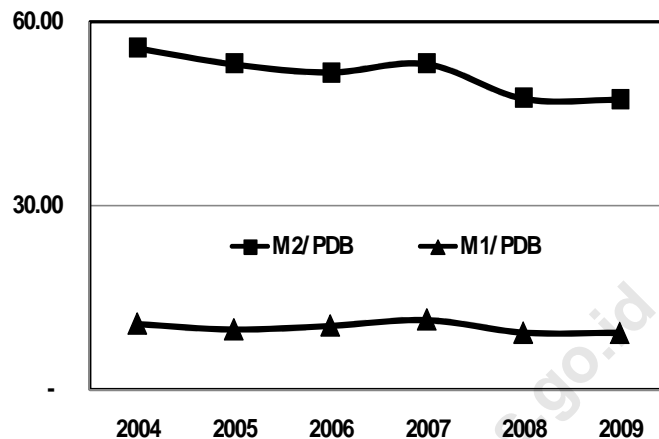
Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia

2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2004-2009 tercermin pada tabel 4.8. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi dari uang kuasi. Selama periode 2004-2009 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,32 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,48 persen, dan sisanya sebesar 0,20 persen berasal dari surat berharga selain saham. Namun pertumbuhan M1 justru meningkat lebih pesat

dibandingkan pertumbuhan uang kuasi. Selama periode 2004 – 2009 M1 tumbuh rata-rata sebesar 15,37 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan uang kuasi yang rata-rata tumbuh sebesar 14,27 persen. Hal ini mencerminkan bahwa M1²⁰ lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi²¹.

Grafik 4.12 Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB, Tahun 2004 - 2009 (Persen)



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2004 – 2009 dapat dilihat dari Grafik 4.12. Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor Keuangan sedang dilakukan, karena sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia.

Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Kedalaman sektor Keuangan terus menunjukkan penurunan sejak krisis 1997/1998. Krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berpengaruh pada sektor Keuangan domestik terlihat semakin menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2009, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2004 – 2009 yaitu sebesar 38,15 persen.

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia

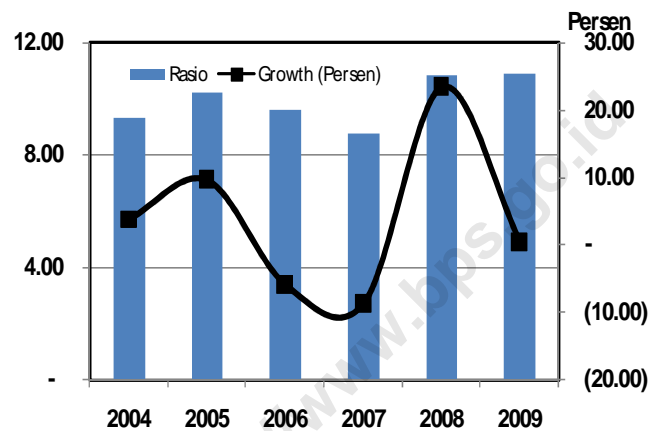
²⁰ yang terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR serta simpanan giro rupiah

²¹ yang terdiri dari simpanan berjangka, tabungan, dan simpanan giro valas

Namun di satu sisi, kondisi sektor Keuangan yang dangkal memungkinkan Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Sektor Keuangan Indonesia yang memiliki eksposur terbatas pada *structured products*, termasuk *subprime mortgage*, menjadikan sistem keuangan Indonesia sedikit terisolasi dari tekanan depresiasi nilai aset *structured products* tersebut.

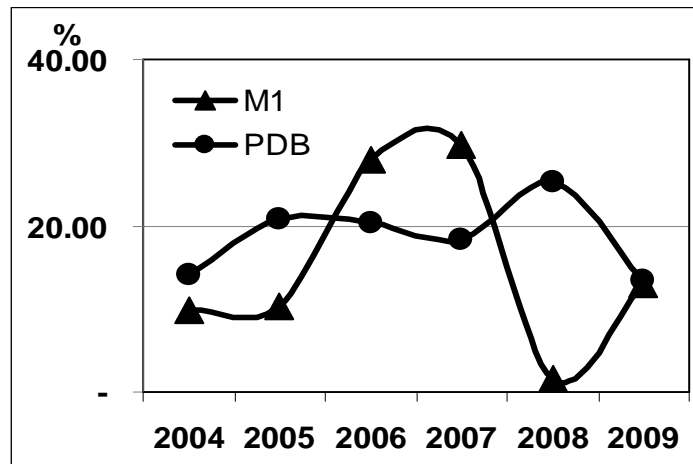
Dengan memperhatikan potret kedangkalan sektor Keuangan yang sedang terjadi maka upaya untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia harus senantiasa dilakukan.

Grafik 4.13 Velocity of Money, Tahun 2004 - 2009



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2004 – 2009 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 8,78 – 10,88.

**Grafik 4.14 Pertumbuhan M1 dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku,
Tahun 2004 – 2009 (Persen)**



Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2004 – 2009 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan PDB atas harga berlaku cenderung mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan M1 cenderung mengalami kenaikan sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Lampiran 1

Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL SECTOR*)

1.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

1.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

1.2.1 Bank Pencipta Uang Giral (*Deposit Money Banks*)

Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. BPUG terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*) sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (*lessor*) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang

kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*Loss Insurance Business*)

Usaha Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (*Loss Adjuster Business*)

Usaha Penilai Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (*Actuarial Consultant Business*)

Usaha Konsultan Aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (*Insurance Agency Business*)

Usaha Agen Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES

- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN
- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Offering* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, *Underwriter*, *Adjuster* dan Penjamin Emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (*NONFINANCIAL SECTORS*)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan

penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta (Bisnis) dan Rumah Tangga.

2.1 Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah (*Government Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dan tatacara pembinaan dan pengawasannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PESERO). Pertamina yang badan hukumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank. Pada umumnya kegiatan utama BUMN non finansial membutuhkan modal (investasi) yang berskala besar.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.2.3 Badan Urusan Logistik (*National Food Authority*)

Merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menghimpun, menyalurkan, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat berupa beras, jagung, terigu/gandum, gula pasir, kacang kedelai dan sebagainya. BULOG tidak digolongkan sebagai bagian dari kegiatan BUMN karena bentuk, sifat dan tujuannya berbeda. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai usahanya tidak berasal dari anggaran belanja negara, tetapi berasal dari

pinjaman bank-bank dalam negeri (BI, BBD, BRI), pihak lain dan kekayaan/tabungan yang berasal dari usahanya.

2.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Non Finansial.

2.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga⁸ dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

⁸ Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 2

**Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus
Dana (NAD) Indonesia**

<https://www.kppia.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

0200 Perolehan Harta Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Pembelian Harta Tak Berwujud Neto.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,

bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin peralatan. Pengeluaran barang modal dan bangunan untuk keperluan militer tidak tercakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

0220 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi Cadangan Valuta Asing Pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman Neto merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau *Saving Investment Gap (S-I Gap)*.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan Valuta Asing (Valas) Pemerintah terdiri dari Emas Moneter, *Special Drawing Rights*, Posisi Cadangan di IMF, Deposito, dan Surat Berharga Dalam Valuta Asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan Valas Pemerintah adalah Aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor Luar Negeri. Dalam penghitungan Pendapatan Nasional, Emas Moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Kategori ini mencakup emas yang dimiliki atau disimpan oleh Bank Indonesia. Emas moneter mencakup juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 *Special Drawing Rights (SDR)*

SDR merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (*IMF*) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan oleh Bank Indonesia, Giro dan Deposito Berjangka di bank-bank Luar Negeri, Wesel Ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Kategori ini mencakup seluruh klaim Luar Negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi, seperti Cadangan Valas Pemerintah, Deposito Dalam Valas, Pinjaman Dalam Valas, Tagihan Jangka Pendek dan Tagihan Jangka Panjang Dalam Valas, serta Obligasi.

1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)

Uang dan Simpanan terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, Deposito dan Giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta Deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di Luar Negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Uang Kartal dan Uang Logam yang beredar, Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Tabungan Giro Pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Kategori ini mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Kategori ini merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Kategori ini merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Kategori ini merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Kategori ini mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG dan Bank Asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Kategori ini mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Kategori ini merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi masuk kategori Klaim Antar Bank (2000).

1023 Tabungan

Tabungan merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan Giro Pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan Koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan

oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dengan surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Kategori ini mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank dalam kategori ini biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada Kredit Konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini hanya mencakup pinjaman Bank dalam rupiah, sedangkan pinjaman Bank dalam valas dimasukkan dalam kategori Pinjaman Dalam Valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka panjang atau menengah yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang-barang tahan lama lainnya untuk keperluan konsumsi. Dalam kategori ini juga termasuk Hutang Hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial (Pemerintah dan Swasta) termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari Perusahaan Asuransi Jiwa, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Kategori ini mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup Hutang Jangka Panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas. Berbeda dengan hutang, Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang Obligasi tidak selalu dijamin oleh harta riilnya.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang Pemerintah yang dijual di dalam maupun luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang

dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori Surat Berharga Jangka Panjang Lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan oleh selain pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit kepemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh Yayasan, Perusahaan Swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Kategori ini mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi Preusan Asuransi Jiwa dan Preusan Dana Pensiun, transaksi ini merupakan hutang Perusahaan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi Preusan Asuransi Non Jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada Preusan Asuransi Non Jiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Kategori ini mencakup mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis, berupa hutang-piutang antar penyuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit Dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit Dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka Kredit Dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening Antar Bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk rekening antar kantor, antar cabang dan kantor

pusat, atau antar cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasnya) dan dimasukkan dalam kategori Rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 3

Matrik NAD Indonesia

Menurut Kategori Transaksi dan Sektor

2004 - 2009

<https://www.nads.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

TABEL 1. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 1. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		20,486		50,105		3,460		138,612		101,857
0200	Investasi Nonfinansial	(196)		3,147		316		74,321		76,437	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	20,681		46,958		3,145		64,291		25,420	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0				(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	20,681		46,958		3,145		64,291		25,420	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	51,254		52,435		45,745		123,493		48,284	
0700	Jumlah Sumber Finansial		30,572		5,477		42,600		59,202		22,864
0800	Cadangan Valas Pemerintah	27,891									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	149		(23,294)	13,632	(3)	(93)		19	1,659	72
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	2,283	(19,066)	(9,739)	67,809	2,544		95,156		(21,112)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	2,283	(17,974)	(9,210)	(817)			(6,122)		(12,154)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(1,092)	(529)	68,626	2,544		101,278		(8,958)	
1021	Uang Kertas dan Logam		14,161	(534)		116		40,081			
1022	Giro		(15,217)	(0)	17,560	114		4,318		(7,583)	
1023	Tabungan		(36)		53,590	73		54,341		(23)	
1024	Deposito Berjangka			(42)	(2,444)	2,241		2,538		(1,657)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			47	(80)					304	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			5,642	5,880	(373)	(132)	298		(3,352)	(419)
1200	Kredit (Jumlah)	7,192	1,251	116,409	3,737	694	21,752	8,193	78,696	67	50,490
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	7,189		96,934			6,899		67,063		(1,491)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,477	686	3,572	8,193	11,364	831	
1230	Kredit dalam Valas	2	1,251	19,475	2,260	8	11,281		269	(764)	51,981
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(4)	441	283	(31,856)	4,475	5,857	52,251		(37,041)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	7,267	5,780	(36,326)	1,977	31,564	4,954	(381)		5,586	(25,356)
1410	Surat Berharga Pemerintah	7,267	34,140	(34,663)		22,989				34,140	(25,356)
1420	Surat Berharga Lainnya		(28,360)	(1,662)	1,977	8,575	4,954	(381)		(28,554)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					156	17,425	10,271			
1800	Kredit Dagang					17,844	1,346	9,372	5,829		
2000	Rekening Antar Bank	(4,362)	32,747	33,723	(3,386)						
9000	Rupa-rupa	10,839	9,419	(34,265)	(52,315)	6,502	(8,509)	(51,666)	(25,342)	102,477	(1,923)
	TOTAL	51,058	51,058	55,582	55,582	46,061	46,061	197,814	197,814	124,721	124,721

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2004 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2004 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	83,933		181,223		(27,383)		552,292	GROSS SAVING	0100
147,622		250,645				552,292		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(63,689)		(69,423)		(27,383)		0		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)		(0)		(0)		(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(63,689)		(69,422)		(27,383)		1		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
(22,835)		255,579		103,862		657,816		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	40,854		325,001		131,244		657,816	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					27,891	27,891	27,891	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		1,824	(702)	12,864	(19,728)	(6,800)	(6,800)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
16,617	15	(33,102)		(2,276)	1,614	50,373	50,372	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,467		554		2,000	1,610	(17,181)	(17,181)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
11,150		(33,671)		(4,275)	4	67,539	67,539	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
502		(26,004)				14,161	14,161	CURRENCY AND COIN	1021
2,327		6,705		(3,538)	(0)	2,343	2,343	DEMAND DEPOSITS	1022
		83		(921)		53,554	53,554	SAVING DEPOSITS	1023
8,322		(13,456)		(432)	(42)	(2,486)	(2,486)	TIME DEPOSITS	1024
		(999)		615	47	(33)	(33)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
	15	15				15	15	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(3,145)	881	3,950	5,829	8,978	(41)	11,998	11,998	SHORT TERM SECURITIES	1100
732	1,169	3,827	111,125	127,535	(3,581)	264,648	264,648	CREDIT	1200
	(125)		32,609		(832)	104,124	104,124	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
732	201	6,147		26		16,614	16,614	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	1,093	(2,320)	78,516	127,510	(2,749)	143,911	143,911	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	20,781	162,830	222,581	36,705	1,695	219,500	219,499	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(623)		(17,338)	17,414	14,558	(461)	4,308	4,308	LONG TERM SECURITIES	1400
		(34,914)		13,965		8,783	8,783	GOVERNMENT BONDS	1410
(623)		17,576	17,414	593	(461)	(4,476)	(4,475)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	1,084	8,082				18,509	18,509	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
1,645	24,800	12,789	11,390	1,714		43,365	43,365	TRADE CREDITS	1800
						29,361	29,361	INTERBANK CLAIMS	2000
(38,061)	(7,876)	112,717	(42,636)	(96,219)	123,855	12,324	12,324	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
124,787	124,787	506,224	506,224	103,862	103,861	1,210,108	1,210,108	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 2. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		17,138		45,511		10,801		191,768		108,813
0200	Investasi Nonfinansial	556		4,314		1,036		33,425		90,213	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	30,845		196,786		53,834		257,427		55,067	
0700	Jumlah Sumber Finansial		14,262		155,589		44,070		99,084		36,467
0800	Cadangan Valas Pemerintah	4,090									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(997)		691	(438)	(13)	53		63	97	(69)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1,220)	19,329	50,122	170,954	6,826		120,784		32,275	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1,220)	3,206	46,980	54,810	1,210		19,859		3,443	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		16,123	3,142	116,144	5,616		75,125		28,832	
1021	Uang Kertas dan Logam		17,975	3,003		749		5,989		749	
1022	Giro		(1,895)	(0)	22,950	(672)		(684)		22,395	
1023	Tabungan		43		(13,892)	227		(15,265)		388	
1024	Deposito Berjangka				107,041	5,295		85,059		4,623	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			139	45	16		26		678	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							25,800			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			5,116	(211)	422	418	178		(8)	
1200	Kredit (Jumlah)	(13,715)	(4,491)	144,974	5,148	1,672	15,127	68	85,828	(689)	(31,712)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(13,716)		134,594			4,992		86,840		(12,734)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				2,929	1,753	1,549	68	(835)	(385)	
1230	Kredit dalam Valas	2	(4,491)	10,380	2,219	(80)	8,586		(176)	(304)	(18,977)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	(79)	(65)	3,806	3,633	1,132	50,211		(7,934)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	20,322	7,139	(1,107)	790	17,760	3,900	13,200		7,213	13,598
1410	Surat Berharga Pemerintah	20,322	8,582	(806)		11,043		(1,850)		8,582	13,598
1420	Surat Berharga Lainnya		(1,443)	(301)	790	6,717	3,900	15,050		(1,369)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					1,383	17,329	16,106			
1800	Kredit Dagang					13,493	8,854	6,477	10,197		
2000	Rekening Antar Bank	(722)	11,536	4,839	3,658	4,149	(24)	4,237			
9000	Rupa-rupa	23,086	(19,172)	(7,784)	(28,119)	4,509	(2,720)	46,167	2,995	24,113	54,649
	TOTAL	31,400	31,400	201,100	201,100	54,871	54,871	290,852	290,852	145,280	145,280

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2005 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2005 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,833		432,804		(71,942)		738,726	GROSS SAVING	0100
70,456		538,726				738,726		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(0)		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(1)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
73,375		146,802		14,409		828,545		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	139,998		252,724		86,351		828,545	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					4,090	4,090	4,090	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		10,188	16,386	14,861	8,831	24,827	24,827	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
15,646		41,914	25,800	3,679	53,941	270,025	270,025	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
8,586		30,144		2,817	53,802	111,818	111,818	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
7,060		11,770		862	139	132,407	132,407	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,497		5,989				17,975	17,975	CURRENCY AND COIN	1021
(741)		(918)		1,676		21,055	21,055	DEMAND DEPOSITS	1022
(139)		838		102		(13,849)	(13,849)	SAVING DEPOSITS	1023
6,558		5,757		(251)		107,041	107,041	TIME DEPOSITS	1024
(115)		103		(664)	139	184	184	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			25,800			25,800	25,800	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1,255	(5)	2,142	11,010	8,438	6,330	17,543	17,543	SHORT TERM SECURITIES	1100
27	3,916	(109)	32,643	(24,494)	1,275	107,734	107,734	CREDIT	1200
	2,637		38,845		299	120,878	120,878	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
27	58	(1,209)	(732)	2,716		2,969	2,969	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	1,221	1,100	(5,470)	(27,210)	975	(16,114)	(16,114)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
19,221	44,239	56,234	113,259	41,236	179	162,536	162,536	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1,715	3,637	(15,258)	46,558	33,701	1,924	77,546	77,546	LONG TERM SECURITIES	1400
(192)		(35,265)		20,345		22,180	22,180	GOVERNMENT BONDS	1410
1,907	3,637	20,007	46,558	13,355	1,924	55,366	55,366	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	590	430				17,919	17,919	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
7,782	21,183	12,483	1,392	1,392		41,627	41,627	TRADE CREDITS	1800
		(4,201)	24	6,892		15,195	15,195	INTERBANK CLAIMS	2000
27,729	66,438	42,979	5,652	(71,295)	9,781	89,504	89,505	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
143,831	143,831	685,528	685,528	14,409	14,409	1,567,271	1,567,271	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 3. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		17,256		27,613		8,815		180,262		181,082
0200	Investasi Nonfinansial	243		2,891		1,567		31,417		113,721	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0							
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	126,964		229,329		30,887		237,046		98,784	
0700	Jumlah Sumber Finansial		109,951		204,607		23,638		88,201		31,423
0800	Cadangan Valas Pemerintah	29,423									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		(6,295)	(5,711)	(25)	98	(70)	(184)		64
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13,228	(76,335)	(14,690)	161,175	12,470		84,189		2,425	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	13,228	(8,458)	(21,812)	(4,746)	(730)		(5,526)		(11,033)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67,876)	7,122	165,921	13,200		80,522		13,458	
1021	Uang Kertas dan Logam		33,703	7,031		1,334		10,669		1,334	
1022	Giro		(101,324)	(1)	57,241	1,016		9,362		1,419	
1023	Tabungan		(256)		52,904	372		43,461		1,508	
1024	Deposito Berjangka				55,261	10,522		17,021		8,931	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			92	515	(43)		9		266	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							9,193			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			2,127	6,282	35	(409)	126			(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(156)	(5,834)	99,969	(608)	(123)	6,636	(57)	65,197	506	(67,241)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		75,599			5,441		64,781		898
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(2,550)	(123)	1,321	(57)	(1,547)	321	
1230	Kredit dalam Valas	(2)	(5,834)	24,370	1,942		(126)	(0)	1,963	185	(68,139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)	(106)	8,694	(136)	3,643	34,824	(200)	5,680	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11,810	13,626	(9,721)	1,828	4,689	(8)	1		15,917	32,284
1410	Surat Berharga Pemerintah	11,810	14,349	(11,505)		3,567				14,349	32,284
1420	Surat Berharga Lainnya		(724)	1,784	1,828	1,122	(8)	1		1,568	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					4,363	20,976	16,813			
1800	Kredit Dagang					29,784	(5,904)	19,259	21,787		
2000	Rekening Antar Bank	167	142,713	156,564	22,045	7,672	13	51			
9000	Rupa-rupa	73,178	35,898	1,481	10,902	(27,841)	(1,406)	81,839	1,487	74,440	66,316
	TOTAL	127,207	127,207	232,220	232,220	32,454	32,454	268,463	268,463	212,505	212,505

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2006 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2006 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,708		467,893		(38,460)		848,168	GROSS SAVING	0100
78,006		620,324				848,168		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(74,298)		(152,431)		(38,460)				NET LENDING/BORROWING	0300
(74,298)		(152,431)		(38,460)				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
								NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12,952		323,518		44,642		1,104,121		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	87,250		475,949		83,101		1,104,121	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					29,423	29,423	29,423	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		(51,331)	(58,753)	(23,089)	(17,280)	(81,653)	(81,653)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
11,642		53,085	9,193	(76,257)	(7,943)	86,091	86,091	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,683		(1,514)		466	(8,034)	(21,238)	(21,238)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
5,959		54,599		(76,724)	91	98,136	98,136	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,667		10,669				33,703	33,703	CURRENCY AND COIN	1021
155		20,647		(76,682)	(1)	(44,083)	(44,083)	DEMAND DEPOSITS	1022
1,148		5,643		517		52,648	52,648	SAVING DEPOSITS	1023
2,012		17,327		(551)		55,261	55,261	TIME DEPOSITS	1024
(24)		314		(7)	92	607	607	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			9,193			9,193	9,193	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
49	(275)	(3,110)	(1,205)	2,205	(2,962)	1,431	1,431	SHORT TERM SECURITIES	1100
(59)	10,564	1,441	(94,598)	(185,876)	1,531	(84,355)	(84,353)	CREDIT	1200
	2,876		943		506	75,445	75,445	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(59)	(30)	456	256	(3,091)		(2,553)	(2,550)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	7,718	985	(95,797)	(182,786)	1,026	(157,248)	(157,248)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
7,670	65,774	464,912	519,376	79,044	(5,240)	591,932	591,932	STOCK AND PARTICIPATION	1300
583	40	11,946	16,275	25,991	(2,827)	61,217	61,217	LONG TERM SECURITIES	1400
(472)		17,638		11,246		46,633	46,633	GOVERNMENT BONDS	1410
1,055	40	(5,691)	16,275	14,745	(2,827)	14,584	14,584	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	600	400				21,576	21,576	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
5,762	8,077	58,352	59,344	2,331	32,183	115,488	115,488	TRADE CREDITS	1800
		(2,978)		3,297		164,772	164,772	INTERBANK CLAIMS	2000
(12,694)	2,469	(209,201)	26,316	216,997	56,215	198,200	198,197	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
90,958	90,958	943,842	943,842	44,642	44,642	1,952,289	1,952,289	TOTAL	

Note U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 4. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(15,432)		24,690		19,386		241,342		168,661
0200	Investasi Nonfinansial	283		2,876		199		161,772		133,690	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(15,715)		21,814		19,187		79,571		34,972	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0						0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(15,715)		21,814		19,187				34,971	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	194,331		298,047		95,082		484,081		(818)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		210,046		276,233		75,895		404,510		(35,789)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	157,378									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	121		3,162	637	0	149		108		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4,543)	43,289	(9,249)	232,504	4,766		126,026		(8,408)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4,543)	(4,626)	(20,110)	35,276	2,475		3,844		(4,788)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		47,914	10,861	197,229	2,291		122,182		(3,620)	
1021	Uang Kertas dan Logam		42,213	9,900		1,616		12,925		1,616	
1022	Giro		5,698		59,407	2,694		8,679		(7,211)	
1023	Tabungan		3		102,057	(393)		104,291		(773)	
1024	Deposito Berjangka				33,079	(1,625)		(3,892)		2,288	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			960	2,686	(1)		179		461	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1,751	9,861	221	(111)	(571)		14	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(11,518)	(62)	209,819	5,767	17,110	9,658	15,011	96,985	38	20,824
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(11,519)		155,013		14,398	3,389		97,727	371	(6,784)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,527	2,629	(15)	15,012		(299)	
1230	Kredit dalam Valas	1	(62)	54,806	4,239	83	6,283	(1)	(742)	(34)	27,607
1300	Modal Saham dan Penyertaan		288	(255)	9,746	38,813	5,255	44,806		(169)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(7,860)	5,061	3,289	3,076	23,739	3,966	10,930		5,020	59,251
1410	Surat Berharga Pemerintah	(7,860)		(464)		13,904					59,251
1420	Surat Berharga Lainnya		5,061	3,753	3,076	9,835	3,966	10,930		5,020	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					389	47,426	5,747			
1800	Kredit Dagang					1,533	(2)	43,033	45,846		
2000	Rekening Antar Bank	(1,642)	87,668	80,719	4,409	1,192	30	158			
9000	Rupa-rupa	62,395	73,803	8,811	10,234	7,318	9,523	238,941	261,572	2,687	(115,864)
	TOTAL	194,614	194,614	300,924	300,924	95,281	95,281	645,852	645,852	132,872	132,872

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2007) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2007) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	40,594		502,550		2,782		984,574	GROSS SAVING	0100
75,508		610,246				984,574		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(34,914)		(107,696)		2,782				NET LENDING/BORROWING	0300
		0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(34,914)		(107,696)		2,782				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
106,512		918,057		230,651		2,325,943		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	141,426		1,025,754		227,869		2,325,943	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					157,378	157,378	157,378	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		12,732	16,578	17,315	15,858	33,330	33,330	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
27,513		116,379		6,572	(16,737)	259,056	259,056	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,235		30,914		2,924	(17,698)	12,953	12,953	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
25,278		85,464		3,648	960	246,103	246,103	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3,231		12,925				42,213	42,213	CURRENCY AND COIN	1021
17,849		40,174		2,921		65,105	65,105	DEMAND DEPOSITS	1022
(349)		(91)		(625)		102,060	102,060	SAVING DEPOSITS	1023
4,074		31,117		1,117		33,079	33,079	TIME DEPOSITS	1024
473		1,340		235	960	3,646	3,646	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
								POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
271	632	2,116	14,410	17,320	(3,670)	21,123	21,123	SHORT TERM SECURITIES	1100
187	12,140	1,793	279,188	193,139	1,079	425,579	425,579	CREDIT	1200
	(488)	148	64,822		(256)	158,411	158,411	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
187	1,396	634	16,848	1,594		19,757	19,757	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11,232	1,010	197,518	191,544	1,335	247,410	247,410	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	101,356	542,966	641,936	132,278	(142)	758,438	758,438	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2,887	1,960	5,913	5,539	32,180	(2,755)	76,098	76,098	LONG TERM SECURITIES	1400
		15,004		38,666		59,251	59,251	GOVERNMENT BONDS	1410
2,887	1,960	(9,091)	5,539	(6,485)	(2,755)	16,847	16,847	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	2,688	43,979				50,114	50,114	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2,830	11,518	82,352	63,083	3,208	12,512	132,956	132,956	TRADE CREDITS	1800
		1,769		9,912		92,107	92,107	INTERBANK CLAIMS	2000
72,824	11,131	108,059	5,019	(181,273)	64,346	319,764	319,764	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182,020	182,020	1,528,303	1,528,303	230,651	230,651	3,310,517	3,310,517	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 5. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		18,624		50,149		18,608		339,129		229,473
0200	Investasi Nonfinansial	176		6,154		2,939		186,531		181,308	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	18,448		43,995		15,668		152,598		48,166	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500					0				(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	18,448		43,995		15,668		152,598		48,166	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(104,120)		331,247		60,336		284,167		127,633	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(122,568)		287,252		44,668		131,569		79,468
0800	Cadangan Valas Pemerintah	44,180									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	234		16,651	3,841	10	(191)		130		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(16,229)	120,450	74,645	267,600	7,829		181,491		115,100	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(16,229)	54,377	57,950	83,132	(1,039)		28,574		54,422	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		66,074	16,694	184,468	8,868		139,751		60,678	
1021	Uang Kertas dan Logam		43,605	16,825		1,339		10,712		1,339	
1022	Giro		22,480		(2,941)	35		(3,852)		45,226	
1023	Tabungan		(12)		43,161	(63)		42,268		88	
1024	Deposito Berjangka				138,247	7,538		90,518		8,755	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(131)	6,001	18		104		5,270	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							13,166			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			9,334	(9,276)	68	370	(341)		(4)	0
1200	Kredit (Jumlah)	47	713	317,593	13,379	32,385	32,200	14,916	189,139	(100)	142,218
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	42		273,911		29,218	8,479		154,845	(320)	506
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(82)	2,834		14,916	34,192	204	
1230	Kredit dalam Valas	4	713	43,682	13,461	332	23,721		102	17	141,712
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	522	1,056	(11,727)	(2,242)	3,118	10,727		(3,559)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	2,471	12,990	(12,493)	(222)	17,989	(1,641)	(36)		12,985	50,225
1410	Surat Berharga Pemerintah	2,471		(12,242)		17,830					50,225
1420	Surat Berharga Lainnya		12,990	(250)	(222)	158	(1,641)	(36)		12,985	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					532	9,368	10,469			
1800	Kredit Dagang					1,753	3,976	(24,065)	(4,017)		
2000	Rekening Antar Bank	2,234	(124,323)	(88,564)	9,194	(7,084)	26	(154)			
9000	Rupa-rupa	(137,056)	(132,920)	13,024	14,463	9,097	(2,558)	91,160	(53,683)	3,210	(112,975)
	TOTAL	(103,944)	(103,944)	337,401	337,401	63,275	63,275	470,698	470,698	308,941	308,941

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

INDONESIA, 2008 *) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2008*) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	64,475		751,990		36,383		1,508,831	GROSS SAVING	0100
114,542		1,017,181				1,508,831		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(50,067)		(265,190)		36,383		0		NET LENDING/BORROWING	0300
						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(50,067)		(265,190)		36,383		(0)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
31,120		(325,595)		248,115		652,904		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	81,187		(60,404)		211,732		652,904	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					44,180	44,180	44,180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	212	(15,280)	13,439	7,752	(8,063)	9,367	9,367	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(7,650)		78,439	13,166	12,383	44,792	446,007	446,007	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(3,631)		45,909		16,475	44,922	182,431	182,431	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4,019)		32,530		(4,091)	(131)	250,411	250,411	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,678		10,712				43,605	43,605	CURRENCY AND COIN	1021
(16,536)		(871)		(4,462)		19,539	19,539	DEMAND DEPOSITS	1022
(397)		735		516		43,149	43,149	SAVING DEPOSITS	1023
10,576		20,916		(57)		138,247	138,247	TIME DEPOSITS	1024
(340)		1,038		(89)	(131)	5,870	5,870	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			13,166			13,166	13,166	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(79)	(1,026)	954	12,505	2	7,361	9,934	9,934	SHORT TERM SECURITIES	1100
935	11,766	30,034	358,150	369,071	17,316	764,881	764,881	CREDIT	1200
	12,442	(92)	126,265		222	302,760	302,760	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
935	2,462	14,186	(3,307)	191		33,265	33,265	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(3,139)	15,941	235,192	368,880	17,094	428,856	428,856	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	24,679	(672,431)	(782,512)	(58,283)	41,189	(724,731)	(724,731)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
7,325	(268)	(58,892)	(25,259)	69,203	2,727	38,551	38,551	LONG TERM SECURITIES	1400
		(21,520)		63,686		50,225	50,225	GOVERNMENT BONDS	1410
7,325	(268)	(37,372)	(25,259)	5,517	2,727	(11,674)	(11,674)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	3,899	2,266				13,267	13,267	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
4	18	397,244	380,077	9,169	4,050	384,104	384,104	TRADE CREDITS	1800
		(2,001)		(19,534)		(115,102)	(115,102)	INTERBANK CLAIMS	2000
30,586	41,909	(85,927)	(29,971)	(141,648)	58,181	(217,554)	(217,554)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
145,662	145,662	691,586	691,586	248,115	248,115	2,161,734	2,161,734	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 6. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(5,054)		83,509		40,695		398,812		155,236
0200	Investasi Nonfinansial	302		5,454		6,205		215,304		189,829	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(5,356)		78,055		34,489		183,508		(34,593)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500										
0500	Inv.Finansial Neto = 0600-0700	(5,356)		78,055		34,489		183,508		(34,593)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	122,131		255,916		240,469		268,802		34,587	
0700	Jumlah Sumber Finansial		127,487		177,861		205,980		85,293		69,180
0800	Cadangan Valas Pemerintah	139,516									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(751)		(13,156)	(3,518)	4	(2,930)		(239)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(9,642)	21,748	50,654	205,476	9,640		177,184		(10,467)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(9,642)	7,809	52,611	12,092	(14)		10,223		7,963	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		13,939	(1,957)	193,384	9,654		166,656		(18,430)	
1021	Uang Kertas dan Logam		14,638	(1,621)		774		6,504		813	
1022	Giro		(711)	36	30,367	195		23,414		(13,535)	
1023	Tabungan		12		82,898	345		79,970		(193)	
1024	Deposito Berjangka				83,615	8,285		56,441		93	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(372)	(3,496)	56		328		(5,608)	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							305			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1,837	1,986	(82)	(184)	207		(5)	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(751)	(1,754)	130,640	(2,807)	9,164	(3,029)	2,017	110,995	(856)	21,024
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(719)		174,728		97	6,975		106,821		1,343
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2,502	5,053	(185)	2,017	1,996	(776)	
1230	Kredit dalam Valas	(32)	(1,754)	(44,088)	(5,309)	4,014	(9,819)		2,178	(80)	19,681
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(50)	25,028	3,287	12,909	66,851	13,964	93,150		1,955	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jmlh)	(626)	(6,866)	(8,779)	2,494	85,729	3,552	19,932		(6,866)	110,679
1410	Surat Berharga Pemerintah	(626)		(9,004)		58,425		7,250			110,679
1420	Surat Berharga Lainnya		(6,866)	225	2,494	27,305	3,552	12,682		(6,866)	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					797	105,786	6,324			
1800	Kredit Dagang						(1)	(22,046)	(12,289)		
2000	Rekening Antar Bank	(3,419)	105,693	71,206	(3,816)	2,185		74			
9000	Rupa-rupa	(2,144)	(16,363)	20,227	(34,864)	66,180	88,822	(8,053)	(13,173)	50,825	(62,522)
	TOTAL	122,433	122,433	261,369	261,369	246,675	246,675	484,106	484,106	224,417	224,417

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

***) Angka sangat sementara

INDONESIA, 2009 **)(Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2009)(IN BILLION RUPIAHS)**

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	52,351		973,495		39,192		1,738,236	GROSS SAVING	0100
110,366		1,210,775				1,738,236		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(58,015)		(237,280)		39,192				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(58,015)		(237,280)		39,192				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
242,639		1,831,403		278,816		3,274,763		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	300,654		2,068,683		239,624		3,274,763	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					139,516	139,516	139,516	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	(212)	2,182	(3,160)	(528)	(2,191)	(12,249)	(12,249)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
4,314		89,695	305	(10,417)	73,432	300,961	300,961	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
7,466		36,961		(11,899)	73,768	93,670	93,670	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(3,152)		52,733		1,482	(336)	206,987	206,987	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,626		6,543				14,638	14,638	CURRENCY AND COIN	1021
2,070		16,348		1,164	36	29,692	29,692	DEMAND DEPOSITS	1022
5		2,613		171		82,910	82,910	SAVING DEPOSITS	1023
(7,325)		25,993		128		83,615	83,615	TIME DEPOSITS	1024
472		1,237		19	(372)	(3,868)	(3,868)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1025
			305			305	305	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
235	34	631	5,447	1,394	(3,054)	4,229	4,229	SHORT TERM SECURITIES	1100
(63)	19,040	3,422	114,221	117,570	3,453	261,143	261,143	CREDIT	1200
	13,713	(97)	45,252		(95)	174,009	174,009	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(63)	943	3,519	3,944	(551)		9,200	9,200	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	4,384		65,025	118,121	3,548	77,934	77,934	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
212,688	251,339	433,015	840,879	339,537	6,312	1,150,432	1,150,432	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1,087	24,213	(57,076)	(13,793)	92,627	5,750	126,029	126,029	LONG TERM SECURITIES	1400
		(25,109)		79,744		110,679	110,679	GOVERNMENT BONDS	1410
1,087	24,213	(31,966)	(13,793)	12,883	5,750	15,350	15,350	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
78		98,587				105,786	105,786	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
11,178	(28,757)	192,402	202,834	(874)	18,873	180,660	180,660	TRADE CREDITS	1800
		(3,904)		35,734		101,877	101,877	INTERBANK CLAIMS	2000
13,123	34,997	1,072,449	921,950	(296,227)	(2,467)	916,379	916,379	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
353,006	353,006	3,042,178	3,042,178	278,816	278,816	5,012,999	5,012,999	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

**) Very Preliminary Figures

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 4

**Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor
2004 - 2009**

<https://www.ps.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		20,486		17,138		17,256
0200	Investasi Nonfinansial	(196)		556		243	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	20,681		16,582		17,013	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	20,681		16,582		17,013	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	51,254		30,845		126,964	
0700	Jumlah Sumber Finansial		30,572		14,262		109,951
0800	Cadangan Valas Pemerintah	27,891		4,090		29,423	
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	149		(997)		(729)	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	2,283	(19,066)	(1,220)	19,329	13,228	(76,335)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	2,283	(17,974)	(1,220)	3,206	13,228	(8,458)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(1,092)		16,123		(67,876)
1021	Uang Kertas dan Logam		14,161		17,975		33,703
1022	Giro		(15,217)		(1,895)		(101,324)
1023	Tabungan		(36)		43		(256)
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	7,192	1,251	(13,715)	(4,491)	(156)	(5,834)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	7,189		(13,716)		(154)	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp						
1230	Kredit dalam Valas	2	1,251	2	(4,491)	(2)	(5,834)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(4)	441	(0)	(79)	44	(117)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	7,267	5,780	20,322	7,139	11,810	13,626
1410	Surat Berharga Pemerintah	7,267	34,140	20,322	8,582	11,810	14,349
1420	Surat Berharga Lainnya		(28,360)		(1,443)		(724)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	(4,362)	32,747	(722)	11,536	167	142,713
9000	Rupa-rupa	10,839	9,419	23,086	(19,172)	73,178	35,898
	JUMLAH	51,058	51,058	31,400	31,400	127,207	127,207

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

SEKTOR BANK SENTRAL, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR CENTRAL BANK SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	(15,432)		18,624		(5,054)	GROSS SAVING	0100
283		176		302		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(15,715)		18,448		(5,356)		NET LENDING/BORROWING	0300
0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(15,715)		18,448		(5,356)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
194,331		(104,120)		122,131		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	210,046		(122,568)		127,487	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
157,378		44,180		139,516		OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
121		234		(751)		OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(4,543)	43,289	(16,229)	120,450	(9,642)	21,748	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(4,543)	(4,626)	(16,229)	54,377	(9,642)	7,809	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
	47,914		66,074		13,939	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
	42,213		43,605		14,638	CURRENCY AND COIN	1021
	5,698		22,480		(711)	DEMAND DEPOSITS	1022
	3		(12)		12	SAVING DEPOSITS	1023
						TIME DEPOSITS	1024
						OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
						SHORT TERM SECURITIES	1100
(11,518)	(62)	47	713	(751)	(1,754)	CREDIT	1200
(11,519)		42		(719)		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
						OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
1	(62)	4	713	(32)	(1,754)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	288	(0)	522	(50)	25,028	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(7,860)	5,061	2,471	12,990	(626)	(6,866)	LONG TERM SECURITIES	1400
(7,860)		2,471		(626)		GOVERNMENT BONDS	1410
	5,061		12,990		(6,866)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
(1,642)	87,668	2,234	(124,323)	(3,419)	105,693	INTERBANK CLAIMS	2000
62,395	73,803	(137,056)	(132,920)	(2,144)	(16,363)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
194,614	194,614	(103,944)	(103,944)	122,433	122,433	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		50,105		45,511		27,613
0200	Investasi Nonfinansial	3,147		4,314		2,891	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	46,958		41,197		24,722	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	46,958		41,197		24,722	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	52,435		196,786		229,329	
0700	Jumlah Sumber Finansial		5,477		155,589		204,607
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(23,294)	13,632	691	(438)	(6,295)	(5,711)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(9,739)	67,809	50,122	170,954	(14,690)	161,175
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(9,210)	(817)	46,980	54,810	(21,812)	(4,746)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(529)	68,626	3,142	116,144	7,122	165,921
1021	Uang Kertas dan Logam	(534)		3,003		7,031	
1022	Giro	(0)	17,560	(0)	22,950	(1)	57,241
1023	Tabungan		53,590		(13,892)		52,904
1024	Deposito Berjangka	(42)	(2,444)		107,041		55,261
1025	Simpanan Rupiah lainnya	47	(80)	139	45	92	515
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	5,642	5,880	5,116	(211)	2,127	6,282
1200	Kredit (Jumlah)	116,409	3,737	144,974	5,148	99,969	(608)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	96,934		134,594		75,599	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp		1,477		2,929		(2,550)
1230	Kredit dalam Valas	19,475	2,260	10,380	2,219	24,370	1,942
1300	Modal Saham dan Penyertaan	283	(31,856)	(65)	3,806	(106)	8,694
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(36,326)	1,977	(1,107)	790	(9,721)	1,828
1410	Surat Berharga Pemerintah	(34,663)		(806)		(11,505)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(1,662)	1,977	(301)	790	1,784	1,828
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	33,723	(3,386)	4,839	3,658	156,564	22,045
9000	Rupa-rupa	(34,265)	(52,315)	(7,784)	(28,119)	1,481	10,902
	JUMLAH	55,582	55,582	201,100	201,100	232,220	232,220

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERBANKAN, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR BANKING SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	24,690		50,149		83,509	GROSS SAVING	0100
2,876		6,154		5,454		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
21,814		43,995		78,055		NET LENDING/BORROWING	0300
21,814		43,995		78,055		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
298,047		331,247		255,916		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	276,233		287,252		177,861	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
3,162	637	16,651	3,841	(13,156)	(3,518)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(9,249)	232,504	74,645	267,600	50,654	205,476	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(20,110)	35,276	57,950	83,132	52,611	12,092	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
10,861	197,229	16,694	184,468	(1,957)	193,384	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
9,900		16,825		(1,621)		CURRENCY AND COIN	1021
	59,407		(2,941)	36	30,367	DEMAND DEPOSITS	1022
	102,057		43,161		82,898	SAVING DEPOSITS	1023
	33,079		138,247		83,615	TIME DEPOSITS	1024
960	2,686	(131)	6,001	(372)	(3,496)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1,751	9,861	9,334	(9,276)	1,837	1,986	SHORT TERM SECURITIES	1100
209,819	5,767	317,593	13,379	130,640	(2,807)	CREDIT	1200
155,013		273,911		174,728		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
	1,527		(82)		2,502	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
54,806	4,239	43,682	13,461	(44,088)	(5,309)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(255)	9,746	1,056	(11,727)	3,287	12,909	STOCK AND PARTICIPATION	1300
3,289	3,076	(12,493)	(222)	(8,779)	2,494	LONG TERM SECURITIES	1400
(464)		(12,242)		(9,004)		GOVERNMENT BONDS	1410
3,753	3,076	(250)	(222)	225	2,494	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
80,719	4,409	(88,564)	9,194	71,206	(3,816)	INTERBANK CLAIMS	2000
8,811	10,234	13,024	14,463	20,227	(34,864)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
300,924	300,924	337,401	337,401	261,369	261,369	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		3,460		10,801		8,815
0200	Investasi Nonfinansial	316		1,036		1,567	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	3,145		9,764		7,249	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	3,145		9,764		7,249	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	45,745		53,834		30,887	
0700	Jumlah Sumber Finansial		42,600		44,070		23,638
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(3)	(93)	(13)	53	(25)	98
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	2,544		6,826		12,470	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas			1,210		(730)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	2,544		5,616		13,200	
1021	Uang Kertas dan Logam	116		749		1,334	
1022	Giro	114		(672)		1,016	
1023	Tabungan	73		227		372	
1024	Deposito Berjangka	2,241		5,295		10,522	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			16		(43)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(373)	(132)	422	418	35	(409)
1200	Kredit (Jumlah)	694	21,752	1,672	15,127	(123)	6,636
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		6,899		4,992		5,441
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	686	3,572	1,753	1,549	(123)	1,321
1230	Kredit dalam Valas	8	11,281	(80)	8,586		(126)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	4,475	5,857	3,633	1,132	(136)	3,643
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	31,564	4,954	17,760	3,900	4,689	(8)
1410	Surat Berharga Pemerintah	22,989		11,043		3,567	
1420	Surat Berharga Lainnya	8,575	4,954	6,717	3,900	1,122	(8)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	156	17,425	1,383	17,329	4,363	20,976
1800	Kredit Dagang	17,844	1,346	13,493	8,854	29,784	(5,904)
2000	Rekening Antar Bank			4,149	(24)	7,672	13
9000	Rupa-rupa	6,502	(8,509)	4,509	(2,720)	(27,841)	(1,406)
	JUMLAH	46,061	46,061	54,871	54,871	32,454	32,454

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR NON BANK FINANCIAL SECTORS, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	19,386		18,608		40,695	GROSS SAVING	0100
199		2,939		6,205		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
19,187		15,668		34,489		NET LENDING/BORROWING	0300
		0				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
19,187		15,668		34,489		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
95,082		60,336		240,469		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	75,895		44,668		205,980	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
0	149	10	(191)	4	(2,930)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
4,766		7,829		9,640		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,475		(1,039)		(14)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
2,291		8,868		9,654		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,616		1,339		774		CURRENCY AND COIN	1021
2,694		35		195		DEMAND DEPOSITS	1022
(393)		(63)		345		SAVING DEPOSITS	1023
(1,625)		7,538		8,285		TIME DEPOSITS	1024
(1)		18		56		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
221	(111)	68	370	(82)	(184)	SHORT TERM SECURITIES	1100
17,110	9,658	32,385	32,200	9,164	(3,029)	CREDIT	1200
14,398	3,389	29,218	8,479	97	6,975	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
2,629	(15)	2,834		5,053	(185)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
83	6,283	332	23,721	4,014	(9,819)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
38,813	5,255	(2,242)	3,118	66,851	13,964	STOCK AND PARTICIPATION	1300
23,739	3,966	17,989	(1,641)	85,729	3,552	LONG TERM SECURITIES	1400
13,904		17,830		58,425		GOVERNMENT BONDS	1410
9,835	3,966	158	(1,641)	27,305	3,552	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
389	47,426	532	9,368	797	105,786	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
1,533	(2)	1,753	3,976		(1)	TRADE CREDITS	1800
1,192	30	(7,084)	26	2,185		INTERBANK CLAIMS	2000
7,318	9,523	9,097	(2,558)	66,180	88,822	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
95,281	95,281	63,275	63,275	246,675	246,675	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		138,612		191,768		180,262
0200	Investasi Nonfinansial	74,321		33,425		31,417	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	64,291		158,343		148,845	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	64,291		158,343		148,845	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	123,493		257,427		237,046	
0700	Jumlah Sumber Finansial		59,202		99,084		88,201
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		19		63		(70)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	95,156		120,784		84,189	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(6,122)		19,859		(5,526)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	101,278		75,125		80,522	
1021	Uang Kertas dan Logam	40,081		5,989		10,669	
1022	Giro	4,318		(684)		9,362	
1023	Tabungan	54,341		(15,265)		43,461	
1024	Deposito Berjangka	2,538		85,059		17,021	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			26		9	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi			25,800		9,193	
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	298		178		126	
1200	Kredit (Jumlah)	8,193	78,696	68	85,828	(57)	65,197
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		67,063		86,840		64,781
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	8,193	11,364	68	(835)	(57)	(1,547)
1230	Kredit dalam Valas		269		(176)	(0)	1,963
1300	Modal Saham dan Penyertaan	52,251		50,211		34,824	(200)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(381)		13,200		1	
1410	Surat Berharga Pemerintah			(1,850)			
1420	Surat Berharga Lainnya	(381)		15,050		1	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	10,271		16,106		16,813	
1800	Kredit Dagang	9,372	5,829	6,477	10,197	19,259	21,787
2000	Rekening Antar Bank			4,237		51	
9000	Rupa-rupa	(51,666)	(25,342)	46,167	2,995	81,839	1,487
	JUMLAH	197,814	197,814	290,852	290,852	268,463	268,463

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR RUMAH TANGGA, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR HOUSEHOLD SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	241,342		339,129		398,812	GROSS SAVING	0100
161,772		186,531		215,304		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
79,571		152,598		183,508		NET LENDING/BORROWING	0300
0		152,598		183,508		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
484,081		284,167		268,802		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	404,510		131,569		85,293	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	108		130		(239)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
126,026		181,491		177,184		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
3,844		28,574		10,223		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
122,182		139,751		166,656		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
12,925		10,712		6,504		CURRENCY AND COIN	1021
8,679		(3,852)		23,414		DEMAND DEPOSITS	1022
104,291		42,268		79,970		SAVING DEPOSITS	1023
(3,892)		90,518		56,441		TIME DEPOSITS	1024
179		104		328		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
		13,166		305		POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(571)		(341)		207		SHORT TERM SECURITIES	1100
15,011	96,985	14,916	189,139	2,017	110,995	CREDIT	1200
	97,727		154,845		106,821	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
15,012		14,916	34,192	2,017	1,996	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(1)	(742)		102		2,178	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
44,806		10,727		93,150		STOCK AND PARTICIPATION	1300
10,930		(36)		19,932		LONG TERM SECURITIES	1400
				7,250		GOVERNMENT BONDS	1410
10,930		(36)		12,682		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
5,747		10,469		6,324		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
43,033	45,846	(24,065)	(4,017)	(22,046)	(12,289)	TRADE CREDITS	1800
158		(154)		74		INTERBANK CLAIMS	2000
238,941	261,572	91,160	(53,683)	(8,053)	(13,173)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
645,852	645,852	470,698	470,698	484,106	484,106	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		101,857		108,813		181,082
0200	Investasi Nonfinansial	76,437		90,213		113,721	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	25,420		18,600		67,361	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	25,420		18,600		67,361	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	48,284		55,067		98,784	
0700	Jumlah Sumber Finansial		22,864		36,467		31,423
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	1,659	72	97	(69)	(184)	64
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(21,112)		32,275		2,425	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(12,154)		3,443		(11,033)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(8,958)		28,832		13,458	
1021	Uang Kertas dan Logam			749		1,334	
1022	Giro	(7,583)		22,395		1,419	
1023	Tabungan	(23)		388		1,508	
1024	Deposito Berjangka	(1,657)		4,623		8,931	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	304		678		266	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(3,352)	(419)	(8)			(0)
1200	Kredit (Jumlah)	67	50,490	(689)	(31,712)	506	(67,241)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(1,491)		(12,734)		898
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	831		(385)		321	
1230	Kredit dalam Valas	(764)	51,981	(304)	(18,977)	185	(68,139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(37,041)		(7,934)		5,680	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	5,586	(25,356)	7,213	13,598	15,917	32,284
1410	Surat Berharga Pemerintah	34,140	(25,356)	8,582	13,598	14,349	32,284
1420	Surat Berharga Lainnya	(28,554)		(1,369)		1,568	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	102,477	(1,923)	24,113	54,649	74,440	66,316
	JUMLAH	124,721	124,721	145,280	145,280	212,505	212,505

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

SEKTOR PEMERINTAH, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR GENERAL GOVERNMENT SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	168,661		229,473		155,236	GROSS SAVING	0100
133,690		181,308		189,829		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
		48,166		(34,593)		NET LENDING/BORROWING	0300
34,972		(0)				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
		48,166		(34,593)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
34,971						TOTAL FINANCIAL USES	0600
(818)		127,633		34,587		TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	(35,789)		79,468		69,180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
		115,100		(10,467)		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(8,408)		54,422		7,963		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4,788)		60,678		(18,430)		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
(3,620)		1,339		813		CURRENCY AND COIN	1021
1,616		45,226		(13,535)		DEMAND DEPOSITS	1022
(7,211)		88		(193)		SAVING DEPOSITS	1023
(773)		8,755		93		TIME DEPOSITS	1024
2,288		5,270		(5,608)		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
461						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
		(4)	0	(5)	(0)	SHORT TERM SECURITIES	1100
14	(0)					CREDIT	1200
	20,824	(100)	142,218	(856)	21,024	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
38		(320)	506		1,343	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
371	(6,784)			(776)		LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(299)		204	141,712	(80)	19,681	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(34)	27,607	17				LONG TERM SECURITIES	1400
		(3,559)		1,955		GOVERNMENT BONDS	1410
						OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
						MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
2,687	(115,864)	3,210	(112,975)	50,825	(62,522)	TOTAL	
132,872	132,872	308,941	308,941	224,417	224,417		

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		83,933		3,833		3,708
0200	Investasi Nonfinansial	147,622		70,456		78,006	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(63,689)		(66,623)		(74,298)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		(0)			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(63,689)		(66,623)		(74,298)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(22,835)		73,375		12,952	
0700	Jumlah Sumber Finansial		40,854		139,998		87,250
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya						
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	16,617	15	15,646		11,642	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	5,467		8,586		5,683	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	11,150		7,060		5,959	
1021	Uang Kertas dan Logam	502		1,497		2,667	
1022	Giro	2,327		(741)		155	
1023	Tabungan			(139)		1,148	
1024	Deposito Berjangka	8,322		6,558		2,012	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(115)		(24)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi		15				
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(3,145)	881	1,255	(5)	49	(275)
1200	Kredit (Jumlah)	732	1,169	27	3,916	(59)	10,564
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(125)		2,637		2,876
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	732	201	27	58	(59)	(30)
1230	Kredit dalam Valas		1,093		1,221		7,718
1300	Modal Saham dan Penyertaan		20,781	19,221	44,239	7,670	65,774
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(623)		1,715	3,637	583	40
1410	Surat Berharga Pemerintah			(192)		(472)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(623)		1,907	3,637	1,055	40
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		1,084		590		600
1800	Kredit Dagang	1,645	24,800	7,782	21,183	5,762	8,077
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	(38,061)	(7,876)	27,729	66,438	(12,694)	2,469
	JUMLAH	124,787	124,787	143,831	143,831	90,958	90,958

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR GOVERNMENT ENTERPRISES SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P U	S S	P U	S S	P U	S S		
	40,594		64,475		52,351	GROSS SAVING	0100
75,508		114,542		110,366		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(34,914)		(50,067)		(58,015)		NET LENDING/BORROWING	0300
(34,914)		(50,067)		(58,015)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
106,512		31,120		242,639		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	141,426		81,187		300,654	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
			212		(212)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
27,513		(7,650)		4,314		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,235		(3,631)		7,466		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
25,278		(4,019)		(3,152)		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3,231		2,678		1,626		CURRENCY AND COIN	1021
17,849		(16,536)		2,070		DEMAND DEPOSITS	1022
(349)		(397)		5		SAVING DEPOSITS	1023
4,074		10,576		(7,325)		TIME DEPOSITS	1024
473		(340)		472		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
271	632	(79)	(1,026)	235	34	SHORT TERM SECURITIES	1100
187	12,140	935	11,766	(63)	19,040	CREDIT	1200
	(488)		12,442		13,713	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
187	1,396	935	2,462	(63)	943	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11,232		(3,139)		4,384	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	101,356		24,679	212,688	251,339	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2,887	1,960	7,325	(268)	1,087	24,213	LONG TERM SECURITIES	1400
						GOVERNMENT BONDS	1410
2,887	1,960	7,325	(268)	1,087	24,213	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	2,688		3,899	78		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2,830	11,518	4	18	11,178	(28,757)	TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
72,824	11,131	30,586	41,909	13,123	34,997	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182,020	182,020	145,662	145,662	353,006	353,006	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		181,223		432,804		467,893
0200	Investasi Nonfinansial	250,645		538,726		620,324	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(69,423)		(105,922)		(152,431)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(69,422)		(105,922)		(152,431)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	255,579		146,802		323,518	
0700	Jumlah Sumber Finansial		325,001		252,724		475,949
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	1,824	(702)	10,188	16,386	(51,331)	(58,753)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(33,102)		41,914	25,800	53,085	9,193
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	554		30,144		(1,514)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(33,671)		11,770		54,599	
1021	Uang Kertas dan Logam	(26,004)		5,989		10,669	
1022	Giro	6,705		(918)		20,647	
1023	Tabungan	83		838		5,643	
1024	Deposito Berjangka	(13,456)		5,757		17,327	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(999)		103		314	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi	15			25,800		9,193
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	3,950	5,829	2,142	11,010	(3,110)	(1,205)
1200	Kredit (Jumlah)	3,827	111,125	(109)	32,643	1,441	(94,598)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		32,609		38,845		943
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	6,147		(1,209)	(732)	456	256
1230	Kredit dalam Valas	(2,320)	78,516	1,100	(5,470)	985	(95,797)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	162,830	222,581	56,234	113,259	464,912	519,376
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(17,338)	17,414	(15,258)	46,558	11,946	16,275
1410	Surat Berharga Pemerintah	(34,914)		(35,265)		17,638	
1420	Surat Berharga Lainnya	17,576	17,414	20,007	46,558	(5,691)	16,275
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	8,082		430		400	
1800	Kredit Dagang	12,789	11,390	12,483	1,392	58,352	59,344
2000	Rekening Antar Bank			(4,201)	24	(2,978)	
9000	Rupa-rupa	112,717	(42,636)	42,979	5,652	(209,201)	26,316
	JUMLAH	506,224	506,224	685,528	685,528	943,842	943,842

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BISNIS, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR PRIVATE ENTERPRISES SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	502,550		751,990		973,495	GROSS SAVING	0100
610,246		1,017,181		1,210,775		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(107,696)		(265,190)		(237,280)		NET LENDING/BORROWING	0300
0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(107,696)		(265,190)		(237,280)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
918,057		(325,595)		1,831,403		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	1,025,754		(60,404)		2,068,683	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
12,732	16,578	(15,280)	13,439	2,182	(3,160)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
116,379		78,439	13,166	89,695	305	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
30,914		45,909		36,961		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
85,464		32,530		52,733		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
12,925		10,712		6,543		CURRENCY AND COIN	1021
40,174		(871)		16,348		DEMAND DEPOSITS	1022
(91)		735		2,613		SAVING DEPOSITS	1023
31,117		20,916		25,993		TIME DEPOSITS	1024
1,340		1,038		1,237		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			13,166		305	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
2,116	14,410	954	12,505	631	5,447	SHORT TERM SECURITIES	1100
1,793	279,188	30,034	358,150	3,422	114,221	CREDIT	1200
148	64,822	(92)	126,265	(97)	45,252	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
634	16,848	14,186	(3,307)	3,519	3,944	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
1,010	197,518	15,941	235,192		65,025	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
542,966	641,936	(672,431)	(782,512)	433,015	840,879	STOCK AND PARTICIPATION	1300
5,913	5,539	(58,892)	(25,259)	(57,076)	(13,793)	LONG TERM SECURITIES	1400
15,004		(21,520)		(25,109)		GOVERNMENT BONDS	1410
(9,091)	5,539	(37,372)	(25,259)	(31,966)	(13,793)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
43,979		2,266		98,587		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
82,352	63,083	397,244	380,077	192,402	202,834	TRADE CREDITS	1800
1,769		(2,001)		(3,904)		INTERBANK CLAIMS	2000
108,059	5,019	(85,927)	(29,971)	1,072,449	921,950	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
1,528,303	1,528,303	691,586	691,586	3,042,178	3,042,178	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2004		2005		2006	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(27,383)		(71,942)		(38,460)
0200	Investasi Nonfinansial						
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(27,383)		(71,942)		(38,460)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(27,383)		(71,942)		(38,460)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	103,862		14,409		44,642	
0700	Jumlah Sumber Finansial		131,244		86,351		83,101
0800	Cadangan Valas Pemerintah		27,891		4,090		29,423
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	12,864	(19,728)	14,861	8,831	(23,089)	(17,280)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(2,276)	1,614	3,679	53,941	(76,257)	(7,943)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	2,000	1,610	2,817	53,802	466	(8,034)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(4,275)	4	862	139	(76,724)	91
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	(3,538)	(0)	1,676		(76,682)	(1)
1023	Tabungan	(921)		102		517	
1024	Deposito Berjangka	(432)	(42)	(251)		(551)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	615	47	(664)	139	(7)	92
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	8,978	(41)	8,438	6,330	2,205	(2,962)
1200	Kredit (Jumlah)	127,535	(3,581)	(24,494)	1,275	(185,876)	1,531
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(832)		299		506
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	26		2,716		(3,091)	
1230	Kredit dalam Valas	127,510	(2,749)	(27,210)	975	(182,786)	1,026
1300	Modal Saham dan Penyertaan	36,705	1,695	41,236	179	79,044	(5,240)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	14,558	(461)	33,701	1,924	25,991	(2,827)
1410	Surat Berharga Pemerintah	13,965		20,345		11,246	
1420	Surat Berharga Lainnya	593	(461)	13,355	1,924	14,745	(2,827)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang	1,714		1,392		2,331	32,183
2000	Rekening Antar Bank			6,892		3,297	
9000	Rupa-rupa	(96,219)	123,855	(71,295)	9,781	216,997	56,215
	JUMLAH	103,862	103,861	14,409	14,409	44,642	44,642

Keterangan P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LUAR NEGERI, 2004-2009 (MILIAR RUPIAH)
FOR REST OF THE WORLD SECTOR, 2004-2009 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2007		2008 ^{*)}		2009 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	2,782		36,383		39,192	GROSS SAVING	0100
						NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
2,782		36,383		39,192		NET LENDING/BORROWING	0300
						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
2,782		36,383		39,192		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
230,651		248,115		278,816		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	227,869		211,732		239,624	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	157,378		44,180		139,516	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
17,315	15,858	7,752	(8,063)	(528)	(2,191)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
6,572	(16,737)	12,383	44,792	(10,417)	73,432	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,924	(17,698)	16,475	44,922	(11,899)	73,768	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
3,648	960	(4,091)	(131)	1,482	(336)	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
						CURRENCY AND COIN	1021
2,921		(4,462)		1,164	36	DEMAND DEPOSITS	1022
(625)		516		171		SAVING DEPOSITS	1023
1,117		(57)		128		TIME DEPOSITS	1024
235	960	(89)	(131)	19	(372)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
17,320	(3,670)	2	7,361	1,394	(3,054)	SHORT TERM SECURITIES	1100
193,139	1,079	369,071	17,316	117,570	3,453	CREDIT	1200
	(256)		222		(95)	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
1,594		191		(551)		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
191,544	1,335	368,880	17,094	118,121	3,548	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
132,278	(142)	(58,283)	41,189	339,537	6,312	STOCK AND PARTICIPATION	1300
32,180	(2,755)	69,203	2,727	92,627	5,750	LONG TERM SECURITIES	1400
38,666		63,686		79,744		GOVERNMENT BONDS	1410
(6,485)	(2,755)	5,517	2,727	12,883	5,750	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
3,208	12,512	9,169	4,050	(874)	18,873	TRADE CREDITS	1800
9,912		(19,534)		35,734		INTERBANK CLAIMS	2000
(181,273)	64,346	(141,648)	58,181	(296,227)	(2,467)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
230,651	230,651	248,115	248,115	278,816	278,816	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

**TABEL 15. NERACA ARUS DANA SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
TAHUN 2009 (DALAM MILIAR RUPIAH)**

**TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2009 (IN BILLION RUPIAHS)**

KODE	KATEGORI TRANSAKSI TRANSACTION CATEGORY	ASURANSI		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PEGADAIAN		DANA PENSIUN		TOTAL	
		INSURANCES		FINANCE COMPANIES		PAWNSHOPS		PENSION FUNDS		TOTAL	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		29,755		7,231		644		3,065		40,695
0200	Investasi Nonfinansial	5,683		(20)		134		408		6,205	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	24,072		7,251		510		2,656		34,489	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500										
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	24,072		7,251		510		2,656		34,489	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	215,515		4,736		5,002		15,217		240,469	
0700	Jumlah Sumber Finansial		191,443		(2,515)		4,492		12,560		205,980
0800	Cadangan Valas Pemerintah										
0900	Klaim dalam Valas Lainnya			4	(2,930)					4	(2,930)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	6,660		741		64		2,175		9,640	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(58)		126		(4)		(79)		(14)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	6,717		615		68		2,254		9,654	
1021	Uang Kertas dan Logam	938		(125)		71		(109)		774	
1022	Giro	(113)		392		(5)		(80)		195	
1023	Tabungan	288		4		0		53		345	
1024	Deposito Berjangka	5,593		300		2		2,391		8,285	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	11		45		(0)		(0)		56	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			(53)	(151)			(29)	(33)	(82)	(184)
1200	Kredit (Jumlah)	49	(63)	4,351	(5,956)	4,702	3,015	61	(24)	9,164	(3,029)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		231	97	3,752		3,015		(23)	97	6,975
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	49	(185)	240		4,702	0	61		5,053	(185)
1230	Kredit dalam Valas		(109)	4,014	(9,708)				(1)	4,014	(9,819)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	64,755	11,637	(4)	2,327			2,100		66,851	13,964
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	76,846		489	2,062		1,490	8,394		85,729	3,552
1410	Surat Berharga Pemerintah	55,363						3,062		58,425	
1420	Surat Berharga Lainnya	21,483		489	2,062		1,490	5,332		27,305	3,552
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		88,492			3		794	17,294	797	105,786
1800	Kredit Dagang						(1)				(1)
2000	Rekening Antar Bank	(1,056)		3,153				88		2,185	
9000	Rupa-rupa	68,261	91,377	(3,946)	2,133	232	(12)	1,633	(4,677)	66,180	88,822
	TOTAL	221,198	221,198	4,715	4,715	5,136	5,136	15,625	15,625	246,675	246,675

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber

Note:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Daftar Pustaka

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. National Income and Economic Accounting, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Bank Indonesia, Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank, Jakarta, 2000.

_____, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, terbit bulanan.

_____, Laporan Perekonomian Indonesia 2009, Jakarta, 2010

Board of Governors of the Federal Reserve System, Guide to the Flow of Funds Accounts, Washington, D.C, 2000.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operatin and Development, United Nations, and World Bank, System of National Accounts, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Bappepam LK, Kementerian Keuangan RI, Laporan Kegiatan Usaha Peransuransian Indonesia 2009, Jakarta, 2010.

_____, Data Statistik Perusahaan Pembiayaan 2009, Jakarta 2010.

_____, Laporan Tahunan Dana Pensiun 2009, Jakarta, 2010.

_____, Laporan Tahunan Bappepam-LK 2009, Jakarta, 2010.

Perusahaan Umum Pegadaian, Laporan Tahunan Pegadaian 2009, Jakarta, 2010.

Badan Pusat Statistik, Studi Neraca Arus Indonesia 1980, Jakarta, 1987.

_____, Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan, berbagai seri, Jakarta.

_____, Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan, Jakarta, berbagai seri.

Central Bank of the Philippines, The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983, Manila, 1985.

_____, Flow of Funds Manual of Accounts, Manila, 1983.

Copeland, M.A., A study of Money of Flows in the United States, New York, 1952.

Dawson, J.C., Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, An Analysis of the Indonesia Flow of Funds, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, The Indonesian Flow of Funds, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., National Income and Flow of Funds Analysis, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

United Nations , Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., Principles of money Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., Ekonomi (Terjemahan), Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 1070

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id